

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5-114

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi atas
Laporan Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ririek Adriansyah
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Karang Tengah Raya Pertanian I/99 RT 05 RW 04
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Heri Supriadi
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jalan Birah II No. 16 RT 05 RW 06
Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ (021) 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

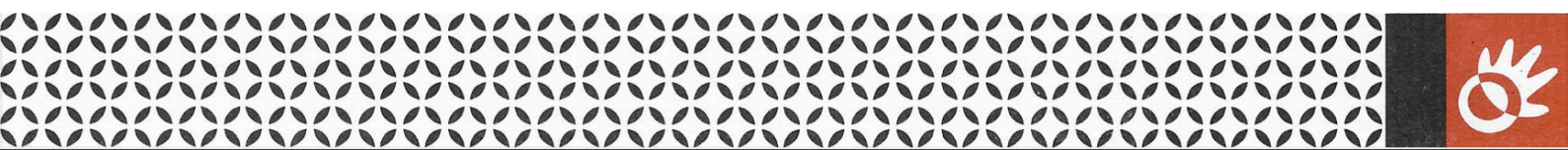
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 April 2025

untuk dan atas nama
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Ririek Adriansyah
Direktur Utama

Heri Supriadi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00646/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/IV/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (“Perusahaan”) dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai “Grup”) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00646/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/IV/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Evaluasi atas estimasi umur manfaat infrastruktur telekomunikasi

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo infrastruktur telekomunikasi konsolidasian adalah sebesar Rp161.035 miliar yang merupakan 54% dari total aset konsolidasian. Seperti dibahas dalam Catatan 2y dan 11 pada laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup menelaah estimasi umur manfaat aset tetap, termasuk infrastruktur telekomunikasi, setidaknya setiap tahun dan estimasi tersebut dimutakhirkan jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya karena perubahan ekspektasi tingkat keausan fisik, keusangan teknis atau keusangan komersial, dan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan aset tetap.

Audit atas estimasi umur manfaat infrastruktur telekomunikasi Grup merupakan hal yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang signifikan karena penentuan estimasi umur manfaat mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk rencana bisnis strategis, perkembangan teknologi masa depan yang diharapkan, dan perilaku pasar.

Respons audit:

Kami memperoleh pemahaman, dan mengevaluasi desain serta menguji efektivitas operasi atas pengendalian internal Grup dalam memperkirakan umur manfaat infrastruktur telekomunikasi. Dalam hal ini termasuk diantaranya pengujian pengendalian penelaahan oleh manajemen dalam memeriksa kelengkapan dan keakuratan data klasifikasi aset dan menilai ketepatan atas pertimbangan mengenai data yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat. Kami juga menguji pengendalian oleh manajemen atas analisis perbandingan, termasuk kriteria pemilihan, atas estimasi umur manfaat infrastruktur telekomunikasi.

Untuk menguji apakah estimasi umur manfaat infrastruktur telekomunikasi yang digunakan oleh manajemen adalah wajar, prosedur audit kami termasuk diantaranya memperoleh pemahaman tentang strategi manajemen terkait penggantian aset dan menilai kewajaran asumsi-asumsi dengan mempertimbangkan sumber eksternal, seperti perkembangan teknologi telekomunikasi, perubahan permintaan pasar, tren ekonomi dan peraturan saat ini. Kami menilai apakah analisis perbandingan estimasi umur manfaat infrastruktur telekomunikasi yang digunakan oleh manajemen lengkap dan konsisten sesuai kriteria pemilihan, melalui perbandingan portofolio sampel perusahaan publik di dalam industri telekomunikasi.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00646/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/IV/2025 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2024 (“Laporan Tahunan”) selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00646/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00646/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Agung Purwanto
Registrasi Akuntan Publik No.: AP. 0687

17 April 2025



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3,32,37	33.905	29.007
Aset keuangan lancar lainnya	4,32,37	1.285	1.661
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian			
Pihak berelasi	5,32,37	2.350	1.918
Pihak ketiga	5,37	9.843	8.749
Aset kontrak	6,32	2.449	2.704
Persediaan	7	1.096	997
Biaya kontrak	9	1.134	653
Klaim restitusi pajak dan pajak dibayar dimuka	27	2.844	1.928
Aset lancar lainnya	8,32	8.174	7.996
Jumlah Aset Lancar		<u>63.080</u>	<u>55.613</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset kontrak	6,32	129	26
Investasi jangka panjang	10,37	8.335	8.162
Biaya kontrak	9	1.596	1.568
Aset tetap	11,32,35a	180.566	180.755
Aset hak-guna	12a	26.910	22.584
Aset takberwujud	14	9.442	8.731
Aset pajak tangguhan	27f	3.409	4.170
Aset tidak lancar lainnya	13,27,32	6.208	5.433
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>236.595</u>	<u>231.429</u>
JUMLAH ASET		<u>299.675</u>	<u>287.042</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	15,32,37	626	585
Pihak ketiga	15,37	14.710	18.023
Liabilitas kontrak	17a,32	7.738	6.848
Utang lain-lain	37	454	441
Utang pajak	27c	3.293	4.525
Beban yang masih harus dibayar	16,32,37	14.192	13.079
Deposit dari pelanggan	32	2.872	2.566
Utang bank jangka pendek	18,32,37	11.525	9.650
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	19,32,37	15.866	10.276
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	12a,37	5.491	5.575
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>76.767</u>	<u>71.568</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	27f	992	841
Liabilitas kontrak	17b,32	2.484	2.591
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	31	1.192	1.153
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	30	11.540	11.414
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	19,32,37	25.518	27.773
Liabilitas sewa	12a,37	18.468	14.850
Liabilitas tidak lancar lainnya		224	290
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>60.418</u>	<u>58.912</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>137.185</u>	<u>130.480</u>
EKUITAS			
Modal saham	21	4.953	4.953
Tambahan modal disetor		2.310	2.711
Komponen ekuitas lainnya	22	9.898	9.639
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	29	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		109.596	103.104
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		142.094	135.744
Kepentingan nonpengendali	20	20.396	20.818
JUMLAH EKUITAS		<u>162.490</u>	<u>156.562</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>299.675</u>	<u>287.042</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PENDAPATAN	23,32	149.967	149.216
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	25,32	(41.202)	(39.718)
Beban penyusutan dan amortisasi	11,12a,14	(32.643)	(32.663)
Beban karyawan	24	(16.807)	(15.927)
Beban interkoneksi	32	(6.880)	(6.363)
Beban umum dan administrasi	26,32	(6.225)	(6.099)
Beban pemasaran	32	(3.824)	(3.530)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi	10	188	(748)
Pendapatan lain-lain - bersih		281	252
Laba (rugi) selisih kurs - bersih		136	(36)
LABA USAHA		42.991	44.384
Penghasilan pendanaan - bersih	32	1.367	1.061
Biaya pendanaan	32	(5.208)	(4.652)
Bagian laba investasi jangka panjang pada entitas asosiasi	10	3	1
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		39.153	40.794
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	27d		
Pajak kini		(7.635)	(8.796)
Pajak tangguhan		(775)	210
		(8.410)	(8.586)
LABA TAHUN BERJALAN		30.743	32.208
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran	22	258	(66)
Perubahan nilai wajar investasi	10	1	2
Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi	10	1	(1)
<i>Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti - bersih	30	635	(1.389)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih		895	(1.454)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		31.638	30.754
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		23.649	24.560
Kepentingan nonpengendali	20	7.094	7.648
		30.743	32.208
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		24.434	23.083
Kepentingan nonpengendali		7.204	7.671
		31.638	30.754
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	28		
Laba bersih per saham		238,73	247,92
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		23.872,88	24.792,50

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal saham	Tambahannya modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih			
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo, 1 Januari 2023		4.953	2.711	9.697	15.337	96.560	129.258	20.004	149.262	
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak		-	-	6	-	-	6	-	6	
Penambahan setoran modal dari kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1e	-	-	-	-	-	-	2.955	2.955	
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	22	22	
Dividen kas	29	-	-	-	-	(16.603)	(16.603)	(9.803)	(26.406)	
Modal saham kepentingan nonpengendali yang diperoleh kembali	1e	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	
Laba tahun berjalan	20	-	-	-	-	24.560	24.560	7.648	32.208	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih		-	-	(64)	-	(1.413)	(1.477)	23	(1.454)	
Saldo, 31 Desember 2023		4.953	2.711	9.639	15.337	103.104	135.744	20.818	156.562	
Saldo, 1 Januari 2024		4.953	2.711	9.639	15.337	103.104	135.744	20.818	156.562	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1e	-	(401)	-	-	-	(401)	(158)	(559)	
Penambahan setoran modal dari kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1e	-	-	-	-	-	-	322	322	
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	13	13	
Dividen kas	29	-	-	-	-	(17.683)	(17.683)	(7.099)	(24.782)	
Modal saham kepentingan nonpengendali yang diperoleh kembali	1e	-	-	-	-	-	-	(704)	(704)	
Laba tahun berjalan	20	-	-	-	-	23.649	23.649	7.094	30.743	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih		-	-	259	-	526	785	110	895	
Saldo, 31 Desember 2024		4.953	2.310	9.898	15.337	109.596	142.094	20.396	162.490	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		148.415	148.458
Penerimaan dari pendapatan bunga		1.366	1.049
Penerimaan restitusi pajak		1.144	681
Pembayaran kas untuk beban		(51.273)	(53.410)
Pembayaran kas kepada karyawan		(16.364)	(16.116)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(11.528)	(10.746)
Pembayaran beban bunga		(5.295)	(4.748)
Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah	12a	(3.693)	(3.770)
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih		(1.691)	(1.410)
Penerimaan kas lainnya - bersih		519	593
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		61.600	60.581
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari penjualan aset tetap	11	717	100
Hasil dari (penempatan pada) aset keuangan lancar lainnya - bersih		339	(315)
Hasil dari klaim asuransi	11	143	199
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi		3	14
Pembelian aset tetap	11,39	(26.005)	(33.601)
Pembelian aset takberwujud	14,39	(3.658)	(2.817)
Pembelian bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh	1e	(635)	-
Kenaikan uang muka dan aset lainnya		(330)	(149)
Penambahan investasi jangka panjang pada instrumen keuangan		(30)	(340)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(29.456)	(36.909)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	18,19	52.653	38.834
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali	1e	322	2.961
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	18,19	(47.607)	(35.323)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	29	(17.683)	(16.603)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		(7.099)	(9.803)
Pembayaran kewajiban sewa	39	(7.387)	(6.602)
Pembelian saham kembali pemegang saham entitas anak	1e	(704)	(31)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		(27.505)	(26.567)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		4.639	(2.895)
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		260	(44)
PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT EKSPEKTASIAN		(1)	(1)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	29.007	31.947
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	33.905	29.007

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah").

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan kebutuhan Perusahaan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan di atas sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 37 tanggal 22 Juni 2022, telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0044650.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha yang secara umum meliputi:

- i. Usaha utama:
 - (a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - (c) Melakukan investasi, termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- ii. Usaha penunjang:
 - (a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
 - (b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;
 - (c) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, dan komunikasi dan teknologi lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, dengan alamat di Jalan Japati No. 1, Bandung.

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut di atas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (“DJPI”), sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“DJPT”).

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi, seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal. Sementara, untuk jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, dan jasa akses internet, terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan, seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan bruto.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPI/KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/M.KOMINFO/16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	1004/KEP/M.KOMINFO/2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	046/KEP/M.KOMINFO/02/2020	Jaringan sistem komunikasi data	3 Agustus 2020
Izin penerbit uang elektronik dan penyelenggara transfer dana	Izin Bank Indonesia 23/587/DKSP/Srt/B	Penerbit uang elektronik dan penyelenggara transfer dana	1 Juli 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	073/KEP/M.KOMINFO/02/2021	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	23 Agustus 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	082/KEP/M.KOMINFO/02/2021	Jaringan tetap sambungan internasional	8 Oktober 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	094/KEP/M.KOMINFO/02/2021	Jaringan tetap tertutup	9 Desember 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	095/KEP/M.KOMINFO/02/2021	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i> dan <i>packet switched</i>	9 Desember 2021

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan

i. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 58 tanggal 28 Mei 2024 dan No. 35 tanggal 23 Juni 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Komisaris Utama/	Bambang Permadi	Bambang Permadi
Komisaris Independen	Soemantri Brojonegoro*	Soemantri Brojonegoro
Komisaris Independen	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Komisaris Independen	Bono Daru Adji	Bono Daru Adji
Komisaris Independen	-	Abdi Negara Nurdin
Komisaris	Arya Mahendra Sinulingga	Arya Mahendra Sinulingga
Komisaris	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Komisaris	Ismail	Ismail
Komisaris	Rizal Mallarangeng	Rizal Mallarangeng
Komisaris	Isa Rachmatarwata	Isa Rachmatarwata
Komisaris	Silmy Karim	Silmy Karim
Direktur Utama	Ririek Adriansyah	Ririek Adriansyah
Direktur <i>Enterprise & Business Service</i>	F.M. Venusiana R.	F.M. Venusiana R.
Direktur <i>Digital Business</i>	Muhamad Fajrin Rasyid	Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Afriwandi	Afriwandi
Direktur Keuangan dan		
Manajemen Risiko	Heri Supriadi	Heri Supriadi
Direktur <i>Network & IT Solution</i>	Herlan Wijanarko	Herlan Wijanarko
Direktur <i>Strategic Portfolio</i>	Budi Setyawan Wijaya	Budi Setyawan Wijaya
Direktur <i>Wholesale &</i>		
<i>International Services</i>	Bogi Witjaksono	Bogi Witjaksono
Direktur <i>Group Business Development</i>	Honesti Basyir	Honesti Basyir

*Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari VP Investor Relation No. Tel.28/UM000/COP-K0F00000/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Pengunduran Diri Komisaris Utama/Komisaris Independen Perusahaan, efektif pada tanggal 14 April 2025 Bapak Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perusahaan.

ii. Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit

Susunan Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Ketua	Bono Daru Adji	Bono Daru Adji
Anggota	Bambang Permadi	Bambang Permadi
	Soemantri Brojonegoro*	Soemantri Brojonegoro
Anggota	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Anggota	-	Abdi Negara Nurdin
Anggota	Emmanuel Bambang Suyitno	Emmanuel Bambang Suyitno
Anggota	Edy Sihotang	Edy Sihotang
<i>Corporate Secretary</i>	Octavius Oky Prakarsa	Anetta Hasan
Internal Audit	Mohamad Ramzy	Daru Mulyawan

*Berdasarkan surat pengunduran diri Bapak Bambang Permadi Brojonegoro sebagai Komisaris Utama/Independen Perusahaan, efektif tanggal 14 April 2025, Bapak Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro berstatus tidak aktif/berhalangan sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

iii. Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan dan entitas anak (secara kolektif disebut "Grup") masing-masing memiliki 19.695 karyawan dan 20.605 karyawan (tidak diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamendemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM., No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Pada Rapat Umum Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2005 dan RUPST pada tanggal 29 Juni 2007, 20 Juni 2008, dan 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III, dan IV program Perusahaan untuk membeli kembali saham Seri B yang telah diterbitkan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Selama periode 21 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2007, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali 211.290.500 saham dari publik (program pembelian kembali saham tahap I). Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual seluruh saham tersebut.

Pada RUPST tanggal 19 April 2013, sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 38 tanggal 19 April 2013, para pemegang saham menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham treasury yang diakuisisi dalam tahap III. Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham Seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham Seri B. Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menjual sisa saham treasury tahap III.

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan menjual saham treasury tahap IV.

Pada RUPST tanggal 27 April 2018, sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 35 tanggal 15 Mei 2018, para pemegang saham menyetujui perubahan rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali sejumlah 1.737.779.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan, dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp5.040 miliar menjadi sebesar Rp4.953 miliar. Dengan demikian, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST telah disetujui pengurangan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp20.000 miliar menjadi sebesar Rp19.500 miliar, sehingga jumlah modal saham dasar Perusahaan menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 389.999.999.999 saham Seri B.

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatitkan pada BEI dan 41.856.946 ADS atau setara dengan 4.185.694.580 lembar saham Seri B telah dicatitkan pada NYSE (Catatan 21).

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun, dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan masing-masing telah dicatitkan di BEI (Catatan 19b).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2024	2023	2024	2023
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")	Jasa jaringan, layanan telekomunikasi seluler, <i>fixed broadband</i> , dan <i>internet protocol television</i> ("IPTV")	1995	70	70	117.403	112.966
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. ("Mitratel")	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa penunjang digital untuk <i>mobile infrastructure</i>	1995	72	72	58.140	57.010
PT Multimedia Nusantara ("Metra")	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia	1998	100	100	17.995	18.457
PT Telekomunikasi Indonesia International ("Telin")	Jasa telekomunikasi dan informasi internasional	1995	100	100	17.173	15.175
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat")	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait	1996	100	100	8.858	7.938
PT Telkom Data Ekosistem ("TDE")	<i>Data center</i>	1996	100	100	8.461	4.059
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma")	Jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer	1988	100	100	6.207	7.616
PT Graha Sarana Duta ("GSD")	Pembangunan, perdagangan, jasa, dan pengangkutan darat	1982	100	100	5.485	5.614
PT Telkom Akses ("Telkom Akses")	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi	2013	100	100	4.480	4.777
PT Telkom Infrastruktur Indonesia ("TIF")	Jasa jaringan telekomunikasi dan informasi	2024	100	100	3.048	0
PT Metra-Net ("Metra-Net")	Jasa portal multimedia	2009	100	100	2.096	1.654
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infra")	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi	2014	100	100	1.359	1.261
PT PINS Indonesia ("PINS")	Perdagangan perangkat telekomunikasi	1995	100	100	733	775
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo")	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network Access Point</i> ("NAP"), <i>Voice Over Data</i> ("VOD"), dan jasa terkait lainnya	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%. Semua entitas anak dengan kepemilikan langsung berdomisili di Indonesia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2024	2023	2024	2023
PT Metra Digital Investama Ventura ("MDI")	Jasa perdagangan, informasi dan teknologi multimedia, hiburan, dan jasa investasi	2013	100	100	9.110	8.556
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd. ("Telin Singapore"), berdomisili di Singapura	Telekomunikasi dan jasa terkait	2008	100	100	6.090	3.499
Telekomunikasi Indonesia International Ltd. ("Telin Hong Kong"), berdomisili di Hong Kong	Pengelolaan investasi dan layanan telekomunikasi	2010	100	100	3.624	3.842
NeutraDC Singapore Pte. Ltd. ("NeutraDC Singapore") berdomisili di Singapura	Data center	2024	100	100	3.478	0
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia")	Jasa layanan informasi, contact center dan content directory	1984	100	100	2.198	2.248
PT Telkom Landmark Tower ("TLT")	Jasa pengembangan dan manajemen properti	2012	55	55	2.120	1.986
PT Persada Sokka Tama ("PST")	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya	2008	100	100	1.621	1.622
PT Teknologi Data Infrastruktur ("TDI")	Jasa telekomunikasi dan data center	2013	60	60	1.426	606
PT Nuon Digital Indonesia ("Nuon")	Jasa penjualan konten digital	2010	100	100	1.393	1.194
PT Finnet Indonesia ("Finnet")	Jasa teknologi informatika	2006	60	60	1.383	1.761
PT Telkomsel Mitra Inovasi ("TMI")	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi	2019	100	100	1.040	1.030
Telekomunikasi Indonesia International (TL) S.A. ("Telkomcel"), berdomisili di Timor Leste	Jaringan telekomunikasi, mobile, internet, dan data	2012	100	100	1.035	1.082
PT Metra Digital Media ("MD Media")	Jasa informasi telekomunikasi dan informasi lainnya	2013	100	100	876	993
PT Administrasi Medika ("Ad Medika")	Jasa administrasi asuransi kesehatan	2002	100	100	702	757

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%. Selain yang disebutkan secara spesifik, entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung berdomisili di Indonesia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2024	2023	2024	2023
PT Telkomsel Ekosistem Digital ("TED")	Jasa konsultasi manajemen bisnis dan investasi, dan/atau penyertaan modal pada perusahaan lain	2021	100	100	451	777
PT Digital Aplikasi Solusi ("Digiserve")	Jasa sistem komunikasi	2014	100	100	441	341
PT Swadharma Sarana Informatika ("SSI")	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan Anjungan Tunai Mandiri ("ATM")	2001	51	51	387	397
PT Ultra Mandiri Telekomunikasi ("UMT")**	Jasa sarana-prasarana jaringan telekomunikasi	2019	100	-	366	-
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN"), berdomisili di Malaysia	Jasa satelit	1996	70	70	357	420
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI")	Jasa dan perdagangan	2014	100	100	288	292
PT Graha Yasa Selaras ("GYS")	Jasa pariwisata dan perhotelan	2012	51	51	277	290
Telekomunikasi Indonesia International (USA) Inc. ("Telin USA"), berdomisili di Amerika Serikat	Jasa telekomunikasi dan informasi	2014	100	100	267	212
PT Nutech Integrasi ("Nutech")	Jasa penyedia sistem integrator	2001	60	60	225	227
PT Collega Inti Pratama ("CIP")	Perdagangan dan jasa	2001	70	70	196	191
PT Graha Telkomsigma ("GTS")	Jasa pengelolaan dan konsultasi	1999	100	100	167	333
Telekomunikasi Indonesia International (Malaysia) Sdn. Bhd. ("Telin Malaysia"), berdomisili di Malaysia	Jasa telekomunikasi dan informasi	2013	70	70	144	125
PT Media Nusantara Data Global ("MNDG")	Jasa konsultasi piranti keras, piranti lunak komputer, data center, dan internet exchange	2012	55	55	134	136
PT Pojok Celebes Mandiri ("PCM")	Usaha pariwisata	2008	100	100	69	44
PT Metra TV ("Metra TV")	Jasa penyiaran berlangganan	2013	100	100	57	50

* Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

** UMT diakuisi oleh Mitratel pada Desember 2024 (Note 1e)

Selain yang disebutkan secara spesifik, entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung berdomisili di Indonesia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2024	2023	2024	2023
Telekomunikasi Indonesia International (Australia) Pty. Ltd. ("Telin Australia"), berdomisili di Australia	Jasa telekomunikasi dan informasi	2013	100	100	52	67
PT Metraplasa ("Metraplasa")	Jasa jaringan dan e-commerce	2012; berhenti beroperasi pada bulan Oktober 2020	60	60	29	30
PT Bosnet Distribution Indonesia ("BDI")***	Perdagangan dan jasa konsultasi	2012	-	60	-	40

* Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

***BDI tidak lagi menjadi entitas anak Metra pada Februari 2024 (Catatan 1e).

Selain yang disebutkan secara spesifik, entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung berdomisili di Indonesia.

e. Informasi penting lainnya

i. Telkomsel

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan telah menandatangani Akta Pemisahan Segmen Usaha IndiHome ke Telkomsel melalui Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 140 yang telah disetujui berdasarkan RUPST 2023 sesuai dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 35 tanggal 23 Juni 2023. Nilai bisnis IndiHome yang dipisahkan adalah Rp58.250 miliar. Bersamaan dengan pemisahan IndiHome tersebut, pemegang saham minoritas Telkomsel, yaitu Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. ("Singtel") juga memutuskan untuk turut melakukan penyertaan modal dengan melakukan setoran secara tunai kepada Telkomsel sebesar Rp2.713 miliar. Atas transaksi ini, sejak 1 Juli 2023, kepemilikan efektif Perusahaan di Telkomsel meningkat dari 65% menjadi 69,9% dan kepemilikan Singtel di Telkomsel terdilusi dari 35% menjadi 30,1%.

ii. Mitratel

Pembelian kembali saham

Pada tanggal 6 Maret 2023, Mitratel mengumumkan untuk melakukan pembelian kembali saham yang dimiliki publik, dengan jumlah maksimum 7,88% saham dari saham Mitratel yang ditempatkan dan disetor penuh. Periode pembelian kembali saham adalah 18 (delapan belas) bulan dimulai dari tanggal 14 April 2023 sampai tanggal 13 Oktober 2024. Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Mitratel telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 1.095.945.900 lembar saham dan 47.700.0000 lembar saham atau setara dengan Rp704 miliar dan Rp 31 miliar.

Akuisisi menara telekomunikasi

- (a) Pada tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat atau *Conditional Sale and Purchase Agreement* ("CSPA") Menara Telekomunikasi antara PT Indosat Tbk. ("Indosat") dengan Mitratel untuk melakukan akuisisi 997 menara telekomunikasi milik Indosat senilai Rp1.648 miliar. Mitratel dan Indosat juga telah menyepakati penyewaan kembali sebanyak 983 *site* selama 10 tahun masa sewa. Selain itu, Indosat juga telah menyepakati untuk memberikan pesanan kolokasi baru selama 3 tahun kedepan, yang akan dibayar oleh Mitratel sebesar Rp473 miliar.
- (b) Pada tanggal 24 November 2023, Mitratel melakukan akuisisi atas 803 menara telekomunikasi milik PT Gametraco Tunggal senilai Rp1.753 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Informasi penting lainnya (lanjutan)

ii. Mitratel (lanjutan)

Akuisisi entitas sepengendali

Berdasarkan Akta Notaris Shinta Dewi S.H., Nomor 2 dan Nomor 3 pada tanggal 2 Desember 2024, Mitratel melakukan penandatanganan Akta Jual Beli Saham (*Share Purchase Agreement*) dengan PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur (“PPIN”) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (“YKPP”) untuk akuisisi 100% saham UMT. Transaksi ini merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, dimana pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari Mitratel dan UMT adalah Pemerintah. Atas transaksi ini Mitratel menjadi pengendali atas UMT.

Selisih antara nilai imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini telah diakui sebagai Tambahan Modal Disetor dalam Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

Imbalan yang dibayarkan	650
Nilai buku ekuitas UMT pada saat akuisisi	<u>(91)</u>
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	559

iii. TDI

Berdasarkan Akta Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 201 tanggal 25 Oktober 2023, menyetujui penerbitan 4.825.932 lembar saham. Atas penerbitan saham tersebut, diambil bagiannya oleh TDE sebanyak 2.451.319 lembar saham atau sebesar Rp256 miliar; ST Dynamo ID Pte, Ltd. sebanyak 2.077.787 lembar saham atau sebesar Rp217 miliar; dan PT Medco Power Indonesia sebanyak 296.826 lembar saham atau sebesar Rp31 miliar. Penambahan modal ini menyebabkan kepemilikan saham milik TDE terdilusi menjadi 60,0%. Efek atas dilusi tersebut dicatat sebagai selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak sebesar Rp6 miliar.

Berdasarkan Akta Notaris Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 313 tanggal 14 Oktober 2024, seluruh pemegang saham TDI menyetujui penerbitan 8.050.000 lembar saham baru. Atas penerbitan saham tersebut, diambil bagiannya oleh TDE sebanyak 4.830.000 lembar saham atau sebesar Rp483 miliar; Nxera ID Pte. Ltd. (sebelumnya ST Dynamo ID Pte. Ltd.) sebanyak 2.817.500 lembar saham atau sebesar Rp282 miliar; dan PT Medco Power Indonesia sebesar 402.500 lembar saham atau sebesar Rp40 miliar. Penambahan modal ini tidak menyebabkan perubahan kepemilikan TDE.

iv. NeutraDC Singapore

Berdasarkan dokumen *Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapore* (“ACRA”), TDE mendirikan NeutraDC Singapore yang berkedudukan di Singapura pada tanggal 7 Desember 2023, dengan jumlah saham sebanyak 1 lembar saham dengan nilai par sebesar SGD 1.

Berdasarkan ACRA, pada tanggal 28 Februari 2024, TDE melakukan setoran modal pada NeutraDC Singapore dengan jumlah saham sebanyak 219.411.975 lembar saham dengan nilai par sebesar US\$219 juta atau senilai Rp3.448 miliar.

v. TIF

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 26 tanggal 8 Desember 2023, Perusahaan dan Metra mendirikan TIF, dengan jumlah saham sebanyak 125 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12,5 juta.

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 7 tanggal 3 Juli 2024, menyetujui penerbitan 19.240.001 lembar saham baru dengan harga nominal per lembar saham sebesar Rp100.000. Atas penerbitan saham tersebut, diambil bagiannya oleh Perusahaan sebanyak 19.240.000 lembar saham atau sebesar Rp1.924 miliar dan Metra sebanyak 1 lembar saham atau sebesar Rp100.000.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Informasi penting lainnya (lanjutan)

vi. Metra

Berdasarkan Akta Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.L.I., M.Kn., No. 31 tanggal 29 Februari 2024, Metra melakukan pengalihan saham sebesar 40% BDI kepada PT Algolab Solution dengan nilai transaksi sebesar Rp29 miliar. Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.L.I., M.Kn., No. 9 tanggal 16 Desember 2024, Metra kembali mengalihkan sisa saham BDI sebesar 20% kepada PT Algolab Solution dengan nilai transaksi sebesar Rp14 miliar. Akibat transaksi ini BDI tidak lagi menjadi entitas anak Metra.

f. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 17 April 2025.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Grup, kecuali atas entitas anak tertentu yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat, Dolar Australia, Dolar Singapura, dan Ringgit Malaysia.

Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi di bawah Rp1 miliar dan US\$1 juta disajikan dengan angka nol.

Standar akuntansi baru

Pada tanggal 1 Januari 2024, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- i. Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- ii. Amendemen PSAK 116: Sewa;
- iii. Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Standar akuntansi baru (lanjutan)

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Terdapat 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

- i. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional;
- ii. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
- iii. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; dan
- iv. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Perubahan Nomenklatur PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2025:

Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Amendemen ini menjelaskan kriteria ketertukaran antara dua mata uang dan mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang tidak dapat dipertukarkan. Amendemen ini diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasi.

Berlaku efektif 1 Januari 2026:

Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Amendemen ini menjelaskan terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan dengan kas menggunakan sistem pembayaran elektronik, klasifikasi aset keuangan, pengungkapan terkait investasi pada instrumen ekuitas ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan pengungkapan terkait persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Amendemen ini diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasi.

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang mana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur, atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini bila Grup memiliki mayoritas atau kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah Grup memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

- i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*;
- ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain; dan
- iii. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, dan arus kas atas transaksi antar-Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- i. menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- ii. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- iii. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- iv. mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian; dan
- v. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dapat diatribusikan pada Grup.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar di mana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat di luar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar saat tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interests*).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 338, seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas di laporan posisi keuangan terdiri dari kas di tangan, kas dan bank, dan deposito jangka pendek yang sangat likuid dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan deposito jangka pendek, sesuai definisi di atas, setelah dikurangi dengan saldo cerukan bank karena dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas Grup.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset keuangan lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan voucher prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih ditentukan dengan mengestimasi harga jual, dikurangi estimasi biaya penjualan atau menentukan biaya penggantian yang berlaku.

Biaya persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehannya.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

g. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Beban dibayar di muka disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset takberwujud

Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (apabila ada). Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Grup mengestimasi nilai terpulihkan dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi jumlah terpulihkan, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, kecuali *goodwill*, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	3-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan; (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan; dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-50
Renovasi bangunan sewa	2-10
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-40
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Kendaraan	4-8
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Peralatan lainnya	2-5

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau (ii) nilai wajar aset yang diterima, dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian dari aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan, dikapitalisasi ke akun aset tetap yang terkait.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai (jika ada), hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai, dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual.

j. Sewa

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak, kecuali dalam kasus di mana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman dalam PSAK 116, antara lain:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna sebagai sewa jangka pendek;
- penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa di mana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;
- tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- untuk tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk sewa di mana aset dasar adalah aset bernilai rendah (yaitu aset dasar dengan nilai maksimum US\$5.000 atau Rp50 juta dalam kondisi baru).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 116 untuk semua kontrak sewa.

i. Grup sebagai lessee

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Tanah	1-33
Bangunan	1-30
Peralatan dan instalasi transmisi	1-25
Kendaraan	1-6
Lain-lain	1-6

Jika kepemilikan aset hak guna dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 236: Penurunan Nilai Aset.

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang cukup pasti akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental karena tingkat suku bunga implisit sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

i. Grup sebagai *lessee* (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 116 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Grup sebagai *lessor*

Berdasarkan PSAK 116, *lessor* terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa di mana Grup mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepri dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Grup mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada *lessor* oleh *lessee*. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang cukup pasti akan dilakukan oleh *lessee* dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 109, penyisihan kerugian kredit ekspektasian telah diakui sebagai piutang sewa dan disajikan sebagai "Piutang lain-lain" (Catatan 8).

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset tetap dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan pendapatan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak. Pendapatan yang timbul dari sewa operasi dicatat sebagai Pendapatan dari transaksi *lessor* (Catatan 2n).

k. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

m. Penjabaran valuta asing

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tengah *Reuters* yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	2024		2023	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	16.090	16.100	15.396	15.401
Dolar Australia ("AU\$") 1	9.995	10.009	10.499	10.505
Dolar Singapura ("SGD") 1	11.815	11.829	11.666	11.673
Dolar Taiwan Baru ("TWD") 1	490,07	490,52	501,32	501,53
Euro ("EUR") 1	16.761	16.775	17.025	17.036
Yen Jepang ("JPY") 1	103,02	103,11	108,78	108,82
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.591	3.601	3.350	3.359
Dolar Hong Kong ("HKD") 1	2.072	2.074	1.971	1.971
Kyat Myanmar ("MMK") 1	7,64	7,69	7,31	7,35

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, di mana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2i).

n. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 115 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk setiap jenis pendapatan:

i. *Mobile*

Pendapatan dari *mobile* terutama terdiri dari pendapatan dari layanan seluler yang antara lain: layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan *Short Messaging Service* ("SMS"). Layanan tersebut ditawarkan secara pascabayar atau Prabayar.

Untuk layanan Prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucher perdana) dan voucher isi ulang pada awalnya diakui sebagai liabilitas kontrak. Grup mengakui aset kontrak untuk penyediaan jasa dari pelanggan pascabayar yang belum ditagih.

Seluruh pendapatan layanan *mobile* diakui berdasarkan metode *output*, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.

Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket bundel yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi.

Pembayaran yang diterima dialokasikan antara layanan telekomunikasi yang terjual dan jumlah poin yang dikeluarkan, dengan nilai yang dialokasikan ke poin yang setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan saat poin tersebut ditukarkan, berakhir masa berlakunya, atau pada saat program tersebut dihapus.

ii. *Consumer*

Pendapatan dari *consumer* terutama terdiri dari pendapatan layanan IndiHome. Pendapatan dari layanan IndiHome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau paket layanan bundel kombinasi layanan *consumer* (misal telepon, internet dan data, serta TV berbayar). Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Grup menerapkan syarat dan ketentuan yang mengharuskan pelanggan untuk membayar denda pengakhiran yang substantif jikalau kontrak berlangganan berakhir atas permintaan dan/atau kesalahan pelanggan dalam 12 bulan pertama setelah layanan aktif. Setelah periode 12 bulan pertama, pelanggan dapat memutuskan untuk berhenti berlangganan sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku tanpa dikenakan denda. Sesuai ketentuan PSAK 115, periode kontrak adalah 12 bulan, dan selanjutnya dapat diperbaharui sebagai kontrak bulanan.

Seluruh layanan *consumer* diakui menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Pelanggan diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli. Grup menilai opsi pembaruan sebesar pembayaran yang diterima dari biaya di muka untuk layanan instalasi. Grup menangguhkan nilai tersebut sebagai liabilitas kontrak dan mengakuinya sebagai pendapatan berdasarkan metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Grup memperkirakan jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

iii. *Enterprise*

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* terutama terdiri atas pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya (misal *manage service*, *call center*, *e-health*, *e-payment*, dan lain-lain). Beberapa kontrak dengan pelanggan perusahaan dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan.

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu jika penyediaan layanan tidak tergantung pada penggunaan (yaitu menit suara, *kilobyte data*, dan lain-lain), kecuali untuk penjualan barang yang diakui pada waktu tertentu, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup. Pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan, biasanya ketika pelanggan memiliki fisik barang.

Beberapa perjanjian dengan pelanggan *enterprise* ditawarkan sebagai produk bundel. Untuk pengaturan yang dibundel, produk dan/atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. Total pembayaran dialokasikan untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda yang telah dimasukkan dalam kontrak, berdasarkan harga jualnya yang berdiri sendiri. Harga jual yang berdiri sendiri ditentukan berdasarkan harga yang dapat diobservasi di mana produk dan/atau jasa individual dijual secara terpisah, disesuaikan dengan kondisi pasar dan diskon normal yang sesuai. Ketika harga yang dapat diobservasi tidak tersedia, biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin digunakan untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri.

Kontrak tertentu dengan pelanggan *enterprise* dapat menimbulkan imbalance variabel karena harga kontrak tergantung pada peristiwa di masa mendatang (misal kontrak berbasis penggunaan atau kontrak berbasis bagi hasil). Dalam memperkirakan imbalance variabel ini, Grup diharuskan untuk menggunakan metode nilai yang diharapkan atau metode jumlah yang paling mungkin berdasarkan metode yang lebih baik memprediksi jumlah pembayaran yang menjadi haknya. Grup menentukan bahwa metode nilai yang paling diharapkan adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam memperkirakan imbalance variabel untuk satu kontrak dengan sejumlah besar kemungkinan hasil.

Sebelum memasukkan jumlah imbalance variabel dalam harga transaksi, Grup mempertimbangkan apakah jumlah imbalance variabel dibatasi. Grup menentukan bahwa taksiran imbalance variabel tidak dibatasi berdasarkan pengalaman historisnya, estimasi bisnis, dan kondisi ekonomi saat ini dan hanya mencakup imbalance variabel sepanjang kemungkinan besar pembalikan signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalance variabel selanjutnya diselesaikan.

Ketika pihak lain terlibat dalam menyediakan produk dan/atau jasa kepada pelanggan, Grup bertindak sebagai prinsipal jika Grup mengendalikan produk dan/atau jasa yang ditentukan sebelum produk dan/atau jasa tersebut ditransfer ke pelanggan. Pendapatan dicatat pada jumlah bersih yang diterima (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok), ketika, pada dasarnya, Grup telah bertindak sebagai agen dan mendapat komisi dari pemasok produk dan/atau jasa yang dijual.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

iv. *Wholesale and International Business* (“WIB”)

Pendapatan dari WIB terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk) dan panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit) dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode *output* menggunakan basis *traffic* aktual yang tercatat untuk bulan tersebut.

Aset kontrak

Aset kontrak awalnya diakui dari pendapatan atas pengalihan barang atau jasa karena penerimaan imbalan masih bersyarat tahapan tertentu atau setelah penyelesaian proyek. Setelah penyelesaian syarat tahapan tertentu atau proyek, jumlah yang diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha.

Aset kontrak dilakukan penilaian penurunan nilai.

Liabilitas kontrak

Liabilitas kontrak diakui jika pembayaran diterima atau pembayaran telah jatuh tempo (mana yang lebih awal) dari pelanggan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa. Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan ketika Grup melaksanakan kewajiban dalam kontrak (misal mengalihkan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan).

Biaya inkremental untuk mendapatkan dan biaya memenuhi kontrak

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai biaya kontrak. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk dan jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya.

Setiap akhir tahun pelaporan, Grup melakukan evaluasi apakah terdapat indikasi bahwa biaya kontrak yang dikapitalisasi mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat biaya kontrak melebihi nilai yang diharapkan diterima dari pertukaran barang dan jasa. Ketika terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai diakui di laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

Pendapatan dari transaksi *lessor*

Pendapatan dari transaksi *lessor* terdiri dari pendapatan dari sewa operasi atas menara telekomunikasi dan sewa lainnya. Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang di mana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- (a) ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- (b) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, di mana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Labanya atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

Grup mengatribusikan imbalan berdasarkan program imbalan pasti, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material di bawah program tersebut.

iii. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

p. Pajak

Pajak Penghasilan ("PPH")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas di mana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT Tahunan") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pemeriksaan pajak

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pajak (lanjutan)

Pajak tangguhan

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku terhadap penghasilan kena pajak ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Pajak tangguhan suatu transaksi diakui di luar laba rugi, oleh karena itu pajak tangguhan atas transaksi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau diakui langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Otoritas Pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk dipulihkan atau diselesaikan.

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

ISAK 123: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pajak (lanjutan)

Pajak final

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: Pajak Penghasilan. Pajak final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan lain-lain - bersih".

q. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan/atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur pada harga transaksi yang telah ditentukan berdasarkan PSAK 115.

Agar aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest ("SPPI") testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari perolehan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

(a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya.

(b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- (c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi investasi jangka panjang pada instrumen keuangan.

- (d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi *SPPI testing* diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan konsolidasian diukur pada nilai wajarnya di mana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset keuangan Grup diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari investasi jangka panjang pada instrumen keuangan dan aset keuangan lancar lainnya.

Kerugian kredit ekspektasian

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian dalam 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan untuk kerugian kredit ekspektasian selama sisa umurnya, terlepas dari waktu gagal bayar (sepanjang umurnya).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk model provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) yaitu kondisi pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi gagal bayar ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Penghapusan piutang usaha dilakukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (b) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, deposit dari pelanggan, pinjaman, dan liabilitas sewa. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan surat utang jangka menengah, utang bank jangka panjang dan pinjaman lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 109 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(b) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 19.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- (i) situasi bisnis yang normal;
- (ii) peristiwa *default*; dan
- (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

iv. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai “Modal Saham yang Diperoleh Kembali” dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selisih antara nilai tercatat dan nilai yang diperoleh kembali dari penjualan kembali saham treasury di masa mendatang, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor dalam ekuitas.

s. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Dewan Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

t. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

u. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (“PKO”) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

v. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang merugi diakui ketika kontrak tersebut menjadi merugi sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

w. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset non-keuangan mengalami penurunan nilai aset. Aset tersebut meliputi atas aset tetap, aset lancar, dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset takberwujud. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas (“UPK”) yang mana aset tercakup (“aset UPK”).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

x. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan sebagai lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;
- ii. untuk diperdagangkan; atau
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
- iv. kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai lancar bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal;
- ii. untuk diperdagangkan;
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
- iv. tidak ada hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Klasifikasi lancar dan tidak lancar (lanjutan)

Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

y. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat keputusan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan yang menyertainya, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian tentang asumsi dan perkiraan ini dapat menghasilkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode mendatang.

i. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut.

ii. Estimasi dan asumsi

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

(a) Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 30 dan 31.

(b) Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan review atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- (c) Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Grup sebagai *lessee*

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika cukup pasti akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup pasti untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Grup menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian.

- (d) Penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan

Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha dan aset kontrak. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Untuk piutang lain-lain, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang lain-lain mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan.

Grup telah membentuk metodologi terkait penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha dan aset kontrak yang didasarkan pada data historis kerugian kredit dan informasi terkini yang lebih mencerminkan perubahan kondisi saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Metode dan pendekatan akan terus dimonitor dan diperbaharui jika terdapat tambahan informasi yang wajar, terdukung, dan tersedia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(e) Pendapatan

- (i) Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Grup menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Grup juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.

Grup menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Grup menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

Grup juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Grup menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Grup, yaitu internet, data, dan jasa teknologi informatika.

- (ii) Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Grup menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Grup menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan. Grup menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis.

- (f) Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan *goodwill*

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan *goodwill*, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

Perhitungan arus kas masa depan dalam menentukan nilai wajar aset tetap dan aset tidak lancar lainnya dari entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi melibatkan estimasi yang signifikan. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 236.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(g) Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Ketika nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak dapat diukur pada harga kuotasian di pasar aktif, nilai wajar diukur menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas diskonto. Input atas model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi apabila memungkinkan, namun apabila tidak tersedia, sejumlah pertimbangan diperlukan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan mencakup input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

(h) Akuisisi

Grup mengevaluasi setiap transaksi akuisisi untuk menentukan akan diperlakukan sebagai akuisisi aset atau kombinasi bisnis. Untuk transaksi yang diperlakukan sebagai akuisisi aset, harga pembelian dialokasikan untuk aset yang diperoleh, tanpa pengakuan *goodwill*. Untuk akuisisi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, Grup menerapkan metode akuntansi untuk kombinasi bisnis atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan hasil operasi disertakan dengan hasil Grup dari tanggal akuisisi masing-masing.

Setiap kelebihan dari harga pembelian dibayar atas jumlah yang diakui untuk aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Grup terus mengevaluasi akuisisi yang diperhitungkan sebagai kombinasi bisnis untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun setelah tanggal akuisisi yang berlaku dari setiap transaksi untuk menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan untuk alokasi harga pembelian yang dibayarkan untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih biasanya ditentukan dengan menggunakan salah satu perkiraan biaya penggantian atau metode penilaian arus kas diskonto. Ketika menentukan nilai wajar dari aset berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan biaya untuk mengganti aset dengan aset baru dengan mempertimbangkan faktor seperti umur, kondisi, dan masa manfaat ekonomi dari aset. Ketika menentukan nilai wajar dari aset tidak berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan tingkat diskonto yang berlaku dan waktu dan jumlah arus kas masa depan, termasuk tingkat dan persyaratan atas perpanjangan dan pengurangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	Mata uang	2024		2023	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kas		-	14	-	14
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	Rp	-	3.278	-	1.471
	US\$	229	3.678	0	6
	TWD	2	1	1	0
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	Rp	-	4.715	-	3.346
	US\$	45	718	37	572
	EUR	2	37	2	38
	JPY	6	1	6	1
	HKD	2	4	1	3
	AU\$	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	Rp	-	4.180	-	4.228
	US\$	31	506	4	64
	SGD	0	0	0	0
	EUR	0	0	0	0
	GBP	0	1	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	Rp	-	4.097	-	2.597
Lain-lain	Rp	-	51	-	59
	US\$	0	0	0	0
Sub-jumlah			<u>21.267</u>		<u>12.385</u>
Pihak ketiga					
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank")	Rp	-	355	-	26
	MYR	1	5	1	3
PT Bank Mega Tbk. ("Bank Mega")	Rp	-	342	-	3
DBS Bank (Hong Kong) Ltd. ("DBS Hong Kong")	US\$	19	308	9	138
	HKD	0	1	0	0
PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	181	-	265
	US\$	2	40	0	2
Standard Chartered Bank ("SCB")	US\$	7	108	14	215
	SGD	5	55	6	74
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	6	102	43	661
	HKD	9	19	5	9
PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")	Rp	-	131	-	144
	US\$	0	3	0	3
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	Rp	-	251	-	336
	US\$	9	146	10	278
	SGD	2	20	3	36
	TWD	28	14	50	21
	MYR	0	2	4	12
	AU\$	0	3	0	5
	MMK	167	1	353	3
	EUR	0	1	0	0
Sub-jumlah			<u>2.088</u>		<u>2.234</u>
Jumlah bank			<u>23.355</u>		<u>14.619</u>
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	Rp	-	1.688	-	1.160
BTN	Rp	-	1.400	-	1.065
	US\$	7	104	-	-
BRI	Rp	-	647	-	1.550
	US\$	18	283	22	340
	TWD	6	3	-	-
BNI	Rp	-	566	-	1.266
	US\$	10	162	23	353
Bank Mandiri	Rp	-	97	-	513
	US\$	-	-	25	392
Sub-jumlah			<u>4.950</u>		<u>6.639</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	Mata uang	2024		2023	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)					
Pihak ketiga					
PT Bank Mega Tbk. ("Bank Mega")	Rp	-	1.922	-	1.433
	US\$	18	287	20	312
Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	Rp	-	962	-	1.569
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank")	Rp	-	254	-	658
	US\$	26	418	23	358
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. ("BJB")	Rp	-	370	-	1.419
	US\$	12	195	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Bank Panin")	Rp	-	274	-	-
PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia")	US\$	16	259	-	-
	SGD	3	35	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Bank Danamon")	Rp	-	133	-	491
	US\$	3	48	9	137
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. ("CCB Indonesia")	US\$	10	153	5	71
SCB	US\$	9	145	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	Rp	-	113	-	1.125
	US\$	1	12	10	155
	MYR	2	7	2	8
Sub-jumlah			<u>5.587</u>		<u>7.736</u>
Jumlah deposito berjangka			10.537		14.375
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian			(1)		(1)
Jumlah			<u>33.905</u>		<u>29.007</u>

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah	0,53% - 7,25%	1,95% - 7,25%
Mata uang asing	2,55% - 6,00%	2,50% - 5,50%

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik negara (pihak berelasi) karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank yang sehat secara finansial.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	2024			2023	
	Saldo			Saldo	
	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BRI	Rp	-	415	-	255
BSI	Rp	-	198	-	118
Bank Mandiri	Rp	-	65	-	95
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	US\$	5	81	5	77
Pihak ketiga	Rp	-	70	-	170
United Overseas Bank Limited Singapore ("UOB Singapore")	US\$	12	195	12	186
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	Rp	-	3	-	85
	US\$	-	-	9	132
Jumlah deposito berjangka			1.027		1.118
Rekening penampungan	Rp	-	144	-	214
	US\$	1	19	2	24
Jumlah rekening penampungan			163		238
Reksa dana					
Pihak berelasi					
Lain-lain	Rp	-	89	-	85
Pihak ketiga					
PT Henan Putihrai Asset Management ("HPAM")	Rp	-	-	-	217
Jumlah reksa dana			89		302
Lain-lain	Rp	-	5	-	3
	MYR	0	1	0	0
Jumlah lain-lain			6		3
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian			(0)		(0)
Jumlah			1.285		1.661

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah	2,50% - 7,25%	2,75% - 6,75%
Mata uang asing	4,57% - 4,61%	2,30% - 5,85%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")	1.935	1.875
Indosat	738	303
PT Indonusa Telemedia ("Indonusa")	386	386
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	409	443
Jumlah	3.468	3.007
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.118)	(1.089)
Jumlah bersih	<u>2.350</u>	<u>1.918</u>

(ii) Pihak ketiga

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pelanggan individual dan bisnis	13.613	11.680
Penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri	1.176	1.541
Jumlah	14.789	13.221
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(4.946)	(4.472)
Jumlah bersih	<u>9.843</u>	<u>8.749</u>

b. Berdasarkan umur

	<u>2024</u>			<u>2023</u>		
	<u>Sebelum penyisihan</u>	<u>Penyisihan kerugian kredit ekspektasian</u>	<u>Tingkat kerugian kredit ekspektasian</u>	<u>Sebelum penyisihan</u>	<u>Penyisihan kerugian kredit ekspektasian</u>	<u>Tingkat kerugian kredit ekspektasian</u>
Belum jatuh tempo	7.319	417	5,7%	7.020	386	5,5%
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	3.602	329	9,1%	2.758	369	13,4%
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.305	285	21,8%	1.215	313	25,8%
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	6.031	5.033	83,5%	5.235	4.493	85,8%
Jumlah	<u>18.257</u>	<u>6.064</u>		<u>16.228</u>	<u>5.561</u>	

Grup telah membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp5.291 miliar dan Rp4.033 miliar. Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan historis tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Rupiah	15.775	13.701
Dolar A.S.	2.180	2.360
Dolar Singapura	273	143
Lain-lain	29	24
Jumlah	18.257	16.228
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(6.064)	(5.561)
Jumlah bersih	<u>12.193</u>	<u>10.667</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo awal	5.561	5.623
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	904	513
Penghapusbukuan piutang	(401)	(575)
Saldo akhir	<u>6.064</u>	<u>5.561</u>

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga. Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha sudah cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, piutang usaha tertentu atas entitas anak masing-masing sebesar Rp2.137 miliar dan Rp1.248 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 19c).

6. ASET KONTRAK

Rincian dari aset kontrak adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Aset kontrak	2.603	2.877
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(25)	(147)
Jumlah bersih	<u>2.578</u>	<u>2.730</u>
Lancar	2.449	2.704
Tidak Lancar	129	26

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas aset kontrak sudah cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya aset kontrak.

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

7. PERSEDIAAN

Persediaan diakui sebesar nilai realisasi bersih, terdiri atas:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kartu SIM dan voucher Prabayar	676	791
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	480	260
Jumlah	1.156	1.051
Provisi atas persediaan usang	(60)	(54)
Jumlah bersih	<u>1.096</u>	<u>997</u>

Manajemen berpendapat saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan yang diakui sebagai beban termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp584 miliar dan Rp797 miliar (Catatan 25).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada persediaan yang dijamin dalam perjanjian pinjaman.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, modul (bagian dari aset tetap) dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar RpNihil dan Rp96 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp94 miliar.

Manajemen berkeyakinan nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

8. ASET LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - bagian jangka pendek (Catatan 35c.i)	6.245	6.173
Piutang lain-lain	621	266
Uang muka	451	768
Gaji dibayar di muka	281	276
Sewa dibayar di muka	129	71
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	447	442
Jumlah	8.174	7.996

9. BIAYA KONTRAK

Mutasi biaya kontrak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		
	Biaya perolehan kontrak	Biaya pemenuhan kontrak	Jumlah
Saldo, 1 Januari 2024	1.641	580	2.221
Penambahan selama tahun berjalan	479	1.318	1.797
Amortisasi selama tahun berjalan	(454)	-	(454)
Beban selama tahun berjalan	-	(831)	(831)
Penurunan nilai	-	(3)	(3)
Saldo, 31 Desember 2024	1.666	1.064	2.730
Lancar	(407)	(727)	(1.134)
Tidak lancar	1.259	337	1.596

	2023		
	Biaya perolehan kontrak	Biaya pemenuhan kontrak	Jumlah
Saldo, 1 Januari 2023	1.554	858	2.412
Penambahan tahun berjalan	461	610	1.071
Amortisasi selama tahun berjalan	(374)	-	(374)
Beban selama tahun berjalan	-	(704)	(704)
Penurunan nilai	-	(184)	(184)
Saldo, 31 Desember 2023	1.641	580	2.221
Lancar	(427)	(226)	(653)
Tidak lancar	1.214	354	1.568

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. INVESTASI JANGKA PANJANG

Rincian dari investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Instrumen keuangan		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:		
Ekuitas	7.797	7.537
Obligasi konversi	377	491
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:		
Ekuitas	27	25
Obligasi konversi	24	-
	8.225	8.053
Entitas asosiasi		
PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin")	110	105
Lain-lain	-	4
	110	109
Jumlah investasi jangka panjang	8.335	8.162

Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan investasi jangka panjang dalam bentuk saham pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Grup tidak memiliki pengaruh signifikan dalam perusahaan *start-up* tersebut.

Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk investasi pada:

- (i) Investasi Telkomsel pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. ("GOTO")

Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Telkomsel menilai nilai wajar investasi di GOTO menggunakan level 1 berdasarkan nilai pasar GOTO sebesar Rp70 per saham dan Rp86 per saham. Jumlah rugi yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada GOTO pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp380 miliar dan Rp119 miliar. Nilai ini disajikan sebagai rugi yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

- (ii) Investasi MDI pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi

Pada tahun 2024 dan 2023, penambahan investasi MDI pada tahun berjalan masing-masing sebesar Rp100 miliar dan Rp338 miliar. Nilai wajar investasi MDI menggunakan level 3, jumlah keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi MDI pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp483 miliar dan (Rp514 miliar). Nilai ini disajikan sebagai keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Rincian informasi terkait teknik valuasi nilai wajar level 1 dan level 3 diungkapkan dalam Catatan 37.

Investasi pada obligasi konversi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Telkomsel dan MDI dalam bentuk obligasi konversi pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Obligasi konversi ini memberikan opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversi obligasi menjadi saham pada saat jatuh tempo, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Dalam hal opsi konversi tidak digunakan, pemegang obligasi berhak menerima pengembalian pokok obligasi.

Bagian kumulatif rugi atas investasi pada entitas asosiasi yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp323 miliar dan Rp328 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Transiasi	31 Desember 2024
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.955	-	13	-	13	1.981
Bangunan	19.596	-	221	(32)	1.122	20.907
Renovasi bangunan sewa	1.675	-	40	(94)	174	1.795
Peralatan sentral telepon	19.636	-	228	(1.090)	696	19.470
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.583	-	-	(1.578)	-	5
Peralatan dan instalasi transmisi	180.664	-	1.393	(9.972)	10.085	182.170
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	10.941	-	50	(114)	3.918	14.795
Jaringan kabel	76.769	314	4.731	(15)	(224)	81.575
Catu daya	24.348	-	559	(730)	1.427	25.604
Peralatan pengolahan data	21.893	-	332	(1.577)	1.292	21.940
Peralatan telekomunikasi lainnya	11.087	-	412	(4)	743	12.238
Peralatan kantor	2.696	0	84	(74)	13	2.719
Kendaraan	593	0	15	(42)	(36)	530
Peralatan lainnya	53	-	3	-	4	60
Aset dalam pembangunan	6.240	-	16.368	(31)	(19.647)	2.930
Jumlah	<u>379.729</u>	<u>314</u>	<u>24.449</u>	<u>(15.353)</u>	<u>(420)</u>	<u>388.719</u>
Akumulasi penyusutan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	6.818	-	650	(27)	20	7.461
Renovasi bangunan sewa	1.312	-	128	(86)	(7)	1.347
Peralatan sentral telepon	14.121	-	1.756	(1.088)	6	14.795
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.582	-	-	(1.578)	-	4
Peralatan dan instalasi transmisi	104.347	-	11.713	(9.787)	48	106.321
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	6.726	-	719	(114)	46	7.377
Jaringan kabel	20.393	-	3.383	(15)	36	23.797
Catu daya	17.387	-	2.014	(710)	29	18.720
Peralatan pengolahan data	16.149	-	2.031	(1.545)	(103)	16.532
Peralatan telekomunikasi lainnya	7.700	-	1.517	(1)	-	9.216
Peralatan kantor	2.136	-	278	(68)	(62)	2.284
Kendaraan	256	-	38	(27)	(17)	250
Peralatan lainnya	47	-	4	-	(2)	49
Jumlah	<u>198.974</u>	<u>-</u>	<u>24.231</u>	<u>(15.046)</u>	<u>(6)</u>	<u>208.153</u>
Nilai buku bersih	<u>180.755</u>					<u>180.566</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Transiasi	31 Desember 2023
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	1.838	110	-	7	1.955
Bangunan	18.947	569	(34)	114	19.596
Renovasi bangunan sewa	1.571	28	(14)	90	1.675
Peralatan sentral telepon	20.083	582	(309)	(720)	19.636
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.583	-	-	-	1.583
Peralatan dan instalasi transmisi	171.106	5.839	(3.562)	7.281	180.664
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	10.804	137	-	-	10.941
Jaringan kabel	74.695	5.762	(6)	(3.682)	76.769
Catu daya	23.276	722	(768)	1.118	24.348
Peralatan pengolahan data	20.954	557	(218)	600	21.893
Peralatan telekomunikasi lainnya	10.402	468	-	217	11.087
Peralatan kantor	2.625	96	(18)	(7)	2.696
Kendaraan	605	48	(56)	(4)	593
Peralatan lainnya	51	1	-	1	53
Aset dalam pembangunan	4.598	18.049	-	(16.407)	6.240
Jumlah	<u>363.138</u>	<u>32.968</u>	<u>(4.985)</u>	<u>(11.392)</u>	<u>379.729</u>
Akumulasi penyusutan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Bangunan	6.228	649	(11)	(48)	6.818
Renovasi bangunan sewa	1.207	141	(6)	(30)	1.312
Peralatan sentral telepon	14.100	1.967	(309)	(1.637)	14.121
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.582	-	-	-	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	97.335	12.171	(3.372)	(1.787)	104.347
Satelit, stasiun bumi, dan peralatan	6.041	746	-	(61)	6.726
Jaringan kabel	22.510	3.215	(6)	(5.326)	20.393
Catu daya	16.890	1.861	(758)	(606)	17.387
Peralatan pengolahan data	15.490	2.093	(217)	(1.217)	16.149
Peralatan telekomunikasi lainnya	6.067	1.659	-	(26)	7.700
Peralatan kantor	2.073	285	(18)	(204)	2.136
Kendaraan	242	48	(31)	(3)	256
Peralatan lainnya	44	3	-	-	47
Jumlah	<u>189.809</u>	<u>24.838</u>	<u>(4.728)</u>	<u>(10.945)</u>	<u>198.974</u>
Nilai buku bersih	<u>173.329</u>				<u>180.755</u>

Kelompok aset tetap yang terdiri dari (1) peralatan sentral telepon; (2) peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data; (3) peralatan dan instalasi transmisi; (4) satelit, stasiun bumi, dan peralatan; (5) jaringan kabel; (6) catu daya; (7) peralatan pengolahan data; dan (8) peralatan telekomunikasi lainnya merupakan infrastruktur utama telekomunikasi Grup.

a. Laba dari penjualan aset tetap

	2024	2023
Hasil penjualan aset tetap	717	100
Nilai buku bersih	(59)	(16)
Labanya dari pelepasan atau penjualan aset tetap	<u>658</u>	<u>84</u>

b. Lain-lain

- (i) Selama tahun 2024 dan 2023, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.
- (ii) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp98 miliar dan Rp124 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 1,50%-6,1% dan 2,50%-8,24% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

- (iii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.
- (iv) Selama tahun 2024 dan 2023, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp143 miliar dan Rp199 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan lain-lain - bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selama tahun 2024 dan 2023, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp114 miliar dan Rp185 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- (v) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 8 - 50 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2025 sampai dengan tahun 2071. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (vi) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp178.692 miliar dan Rp175.519 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis. Jumlah keseluruhan pertanggungan untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp44.143 miliar dan Rp41.045 miliar, HKD10 juta dan HKD10 juta, SGD219 juta dan SGD373 juta. Jumlah pertanggungan untuk *first loss basis* masing-masing sebesar Rp2.750 miliar dan Rp2.750 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
- (vii) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah masing-masing sekitar 53,29% dan 74,09% dari nilai kontrak atau Rp3.064 miliar dan Rp5.836 miliar sebagai jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan, dengan perkiraan penyelesaian masing-masing sampai Desember 2026 dan Desember 2025. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel, dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (viii) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 19b). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp2.190 miliar dan Rp3.076 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 19c).
- (ix) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp89.480 miliar dan Rp85.564 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (x) Pada tahun 2024 dan 2023, nilai wajar tanah dan bangunan Grup adalah sebesar Rp53.262 miliar dan Rp51.373 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. SEWA

a. Grup sebagai *lessee*

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, kendaraan, dan lain-lain yang digunakan dalam operasi, yang pada umumnya memiliki masa sewa antara 1 dan 33 tahun.

Nilai tercatat aset hak-guna yang diakui dan mutasi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	Tanah	Bangunan	Peralatan dan instalasi transmisi	Kendaraan	Lain-lain	Jumlah
Saldo, 1 Januari 2023	4.087	663	14.859	523	204	20.336
Penambahan	1.654	156	7.460	227	893	10.390
Pengurangan dan reklasifikasi	(52)	(88)	(2.851)	8	1	(2.982)
Beban penyusutan	(998)	(149)	(3.600)	(236)	(177)	(5.160)
Saldo, 31 Desember 2023	4.691	582	15.868	522	921	22.584
Penambahan	1.725	198	7.337	241	920	10.421
Pengurangan dan reklasifikasi	(167)	(0)	(409)	(4)	(16)	(596)
Beban penyusutan	(1.074)	(192)	(3.699)	(266)	(268)	(5.499)
Saldo, 31 Desember 2024	5.175	588	19.097	493	1.557	26.910

Nilai tercatat liabilitas sewa dan rincian mutasinya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo, 1 Januari	20.425	18.661
Akrualisasi bunga	1.335	976
Penambahan (Catatan 39a)	10.421	10.390
Pengurangan	(8.222)	(9.602)
Saldo, 31 Desember	23.959	20.425
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.491)	(5.575)
Bagian jangka panjang	18.468	14.850

Jatuh tempo pembayaran liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kurang dari 1 tahun	6.824	6.614
1-5 tahun	14.356	11.453
Lebih dari 5 tahun	8.081	6.431
Jumlah pembayaran sewa	29.261	24.498
Bunga	(5.302)	(4.073)
Nilai kini atas pembayaran sewa	23.959	20.425
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.491)	(5.575)
Bagian jangka panjang	18.468	14.850

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. SEWA (lanjutan)

a. Grup sebagai *lessee* (lanjutan)

Grup juga memiliki sewa tertentu dengan jangka waktu dua belas bulan atau kurang dan nilai sewa bernilai rendah. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' sebagai pengecualian untuk sewa ini. Tidak ada kontrak sewa dengan pembayaran sewa variabel.

Berikut adalah beban terkait sewa yang diakui pada tahun berjalan:

	2024	2023
Beban penyusutan	5.499	5.160
Beban sewa jangka pendek	3.689	3.743
Beban bunga sewa	1.335	976
Beban sewa aset bernilai rendah	4	27

b. Grup sebagai *lessor*

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 28 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2025 hingga 2037. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kurang dari 1 tahun	6.222	5.099
1-5 tahun	8.502	9.412
Lebih dari 5 tahun	3.518	5.098
Jumlah	18.242	19.609

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Klaim restitusi pajak - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 27b)	2.818	1.606
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 35c.i)	1.594	1.987
Beban dibayar di muka	1.056	984
Uang jaminan	234	159
Uang muka	205	368
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	301	329
Jumlah	6.208	5.433

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2024	1.492	21.642	550	1.694	25.378
Penambahan	-	3.415	94	9	3.518
Pengurangan	(18)	(4.489)	-	-	(4.507)
Reklasifikasi/translasi	-	(37)	3	-	(34)
Saldo, 31 Desember 2024	<u>1.474</u>	<u>20.531</u>	<u>647</u>	<u>1.703</u>	<u>24.355</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2024	(413)	(15.034)	(200)	(1.000)	(16.647)
Beban amortisasi	-	(2.515)	(76)	(71)	(2.662)
Penurunan nilai	(77)	-	-	-	(77)
Pengurangan	11	4.472	-	-	4.483
Reklasifikasi/translasi	-	(9)	(1)	-	(10)
Saldo, 31 Desember 2024	<u>(479)</u>	<u>(13.086)</u>	<u>(277)</u>	<u>(1.071)</u>	<u>(14.913)</u>
Nilai buku bersih	<u>995</u>	<u>7.445</u>	<u>370</u>	<u>632</u>	<u>9.442</u>

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2023	1.492	19.779	620	1.491	23.382
Penambahan	-	2.763	69	206	3.038
Pengurangan	-	(890)	(130)	-	(1.020)
Reklasifikasi/translasi	-	(10)	(9)	(3)	(22)
Saldo, 31 Desember 2023	<u>1.492</u>	<u>21.642</u>	<u>550</u>	<u>1.694</u>	<u>25.378</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2023	(402)	(13.616)	(152)	(910)	(15.080)
Beban amortisasi	-	(2.321)	(58)	(94)	(2.473)
Penurunan nilai	(11)	-	-	-	(11)
Pengurangan	-	890	2	-	892
Reklasifikasi/translasi	-	13	8	4	25
Saldo, 31 Desember 2023	<u>(413)</u>	<u>(15.034)</u>	<u>(200)</u>	<u>(1.000)</u>	<u>(16.647)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.079</u>	<u>6.608</u>	<u>350</u>	<u>694</u>	<u>8.731</u>

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi oleh Mitratel, Metranet, Metra, Sigma, TDE, dan Telkomsat masing-masing sebesar Rp467 miliar, Rp220 miliar, Rp85 miliar, Rp78 miliar, Rp77 miliar, dan Rp68 miliar. Pengurangan *goodwill* timbul dari divestasi BDI (Catatan 1e.vi).
- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2024, *goodwill* yang mengalami penurunan nilai adalah *goodwill* yang timbul dari Digiserve dan MNDG masing-masing sebesar Rp64 miliar dan Rp13 miliar. Rugi penurunan nilai diakui sebagai bagian dari "Beban penyusutan dan amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- (iii) Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing 1 - 6 tahun. Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari "Beban penyusutan dan amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- (iv) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp8.345 miliar dan Rp10.604 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	378	424
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	248	161
Sub-jumlah	<u>626</u>	<u>585</u>
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	9.729	12.748
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan, dan Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")	2.631	2.399
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	2.350	2.876
Sub-jumlah	<u>14.710</u>	<u>18.023</u>
Jumlah	<u>15.336</u>	<u>18.608</u>

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Rupiah	13.217	15.929
Dolar A.S.	2.059	2.537
Lain-lain	60	142
Jumlah	<u>15.336</u>	<u>18.608</u>

Syarat dan ketentuan atas utang usaha di atas:

- (i) Utang usaha tidak dikenakan bunga dan secara umum diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun.
- (ii) Lihat Catatan 32c untuk rincian transaksi pihak berelasi.
- (iii) Lihat Catatan 37b.v untuk manajemen risiko likuiditas Grup.

GSD, Telkom Akses, dan Mitratel memiliki kerjasama dengan beberapa Bank dalam fasilitas pembiayaan *supply chain*. Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh pemasok GSD, Telkom Akses, dan Mitratel untuk memperoleh pembayaran atas tagihan yang telah disetujui untuk dibayarkan oleh bank sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat liabilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Liabilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok	475	257
Jumlah yang vendor telah terima dari penyedia pembiayaan	473	257
Rentang tanggal jatuh tempo	1 - 3 bulan	1 - 3 bulan

Tidak ada kombinasi bisnis material atau perbedaan nilai tukar mata uang asing yang akan mempengaruhi kewajiban berdasarkan pengaturan pembiayaan pemasok pada kedua periode tersebut. Terdapat transfer non-tunai dari utang usaha ke kewajiban berdasarkan pengaturan pembiayaan pemasok sebesar Rp115 miliar dan Rp61 miliar masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	6.424	5.813
Gaji dan tunjangan	3.856	3.909
Umum, administrasi, dan pemasaran	3.665	3.114
Beban bunga dan administrasi bank	247	243
Jumlah	<u>14.192</u>	<u>13.079</u>

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS KONTRAK

Rincian dari liabilitas kontrak adalah sebagai berikut:

a. Liabilitas kontrak jangka pendek

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Uang muka pelanggan <i>Mobile</i>	3.285	3.267
Uang muka pelanggan <i>Enterprise</i>	2.306	1.587
Uang muka pelanggan WIB	1.322	1.291
Uang muka pelanggan <i>Consumer</i>	244	244
Uang muka pelanggan lain-lain	581	459
Jumlah	<u>7.738</u>	<u>6.848</u>

b. Liabilitas kontrak jangka panjang

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Uang muka pelanggan WIB	948	795
Uang muka pelanggan <i>Consumer</i>	602	705
Uang muka pelanggan <i>Enterprise</i>	247	251
Uang muka pelanggan lain-lain	687	840
Jumlah	<u>2.484</u>	<u>2.591</u>

Mutasi liabilitas kontrak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo, 1 Januari	9.439	7.856
Ditangguhkan selama tahun berjalan	7.631	7.878
Diakui sebagai pendapatan selama tahun berjalan	(6.848)	(6.295)
Saldo, 31 Desember	<u>10.222</u>	<u>9.439</u>
Lancar	<u>7.738</u>	<u>6.848</u>
Tidak lancar	<u>2.484</u>	<u>2.591</u>

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Kreditur	Saldo terutang	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pihak berelasi		
Bank Mandiri	3.755	4.013
BNI	1.799	903
Sub-jumlah	<u>5.554</u>	<u>4.916</u>
Pihak ketiga		
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	2.440	2.547
MUFG Bank ("MUFG")	1.805	1.155
Bank of China	1.000	-
PT Bank DBS Indonesia ("DBS")	440	440
PT Bank Maspion Indonesia Tbk. ("Bank Maspion")	167	-
UOB Indonesia	100	500
Lain-lain	19	92
Sub-jumlah	<u>5.971</u>	<u>4.734</u>
Jumlah	<u>11.525</u>	<u>9.650</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Bank Mandiri							
2020 - 2023	Finnet, PST	Rp	600	21 Februari 2025 - 28 April 2025	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 1,30% 3 bulan JIBOR + 1,25%	Tidak ada
2021 - 2022	Nutech, Mitratel	Rp	3.550	25 Juli 2025 - 27 September 2025	Bulanan	6,00% - 9,00%	Piutang usaha dan aset tetap
BNI							
2014 - 2024	Sigma, GSD, Mitratel	Rp	1.350	29 Mei 2025 - 9 Januari 2026	Bulanan	6,00% - 8,50%	Piutang usaha dan aset tetap
2017 - 2021	Infomedia, Metranet, Telkom Infra	Rp	1.135	18 Februari 2025 - 6 Juni 2025	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,75% - 2,50%	Piutang usaha
HSBC							
2014	Sigma ^a	Rp	400	6 November 2025	Bulanan	Under BLR 7,40%	Piutang usaha
2018 - 2023	Sigma, Metra, PINS, Metranet, Telkom Infra, GSD, TDE	Rp	2.723	20 Januari 2025 - 4 Oktober 2025	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 0,35% - 0,80% 3 bulan JIBOR + 2,00%	Tidak ada
MUFG							
2018 - 2019	Infomedia, Metra, GSD, Telkom Infra, Telkom Infra	Rp	2.176	27 Maret 2025 - 31 Oktober 2025	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 0,25% - 0,80% 3 bulan JIBOR + 0,25% - 0,80%	Tidak ada
Bank of China							
2020	Perusahaan	Rp	1.000	23 Oktober 2025	Kuartalan	4,90%	Tidak ada
DBS							
2018	Telkom Infra, Infomedia	Rp	440	31 Juli 2025	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,20%	Tidak ada
Bank Maspion							
2023	Metranet	Rp	170	26 Januari 2025	Bulanan	7,25%	Tidak ada
UOB Indonesia							
2016	Finnet	Rp	500	31 Juli 2025	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal.

** Lihat Catatan 5 dan Catatan 11 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijamin.

^a Perpanjangan otomatis jika belum dilunasi.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya batasan bahwa Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham mayoritas paling sedikit 51% terhadap anak perusahaan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk Sigma terkait *current ratio* dan *debt to service coverage ratio* yang masih lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) untuk pinjaman sebesar Rp758 miliar dari HSBC untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk Sigma. *Waiver* dari HSBC diterima pada tanggal 18 Desember 2024 dan berlaku efektif selama 12 bulan setelah periode pelaporan.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut:

	Catatan	2024	2023
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	19a	-	84
Obligasi dan <i>medium-term notes</i> ("MTN")	19b	2.347	548
Utang bank	19c	13.519	9.282
Pinjaman lainnya	19d	-	362
Jumlah		15.866	10.276

Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya adalah sebagai berikut:

	Catatan	2024	2023
Obligasi dan MTN	19b	2.696	4.795
Utang bank	19c	22.822	22.978
Jumlah		25.518	27.773

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2026	2027	2028	2029	
Obligasi dan MTN	19b	2.696	-	-	-	-	2.696
Utang bank	19c	22.822	6.867	4.894	4.134	3.732	3.195
Jumlah		25.518	6.867	4.894	4.134	3.732	5.891

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

	Kreditur	Mata uang	2024		2023	
			Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri		Yen	-	-	768	84
Jumlah			-	-	-	84
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			-	-	-	(84)
Bagian jangka panjang			-	-	-	-

	Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri		Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%

Perusahaan telah melunasi pinjaman pada tahun 2024.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan MTN

Obligasi dan MTN	Saldo terutang	
	2024	2023
Obligasi		
Obligasi Telkom Tahun 2015		
Seri B	2.100	2.100
Seri C	1.200	1.200
Seri D	1.500	1.500
Obligasi Mitratel Tahun 2024	240	-
Sukuk Mitratel Tahun 2024	10	-
MTN		
MTN Mitratel Tahun 2023	-	550
Jumlah	5.050	5.350
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(7)	(7)
Bagian jangka panjang	5.043	5.343
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(2.347)	(548)
Bagian jangka panjang	2.696	4.795

i. Obligasi

(a) Obligasi Telkom Tahun 2015

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 11b.viii). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW"), PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata. Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya dipergunakan untuk pengembangan usaha: *broadband, backbone, metro network, regional metro junction, information technology application and support*, dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 31 Desember 2024, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (i) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1;
- (ii) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1;
- (iii) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan MTN (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

(b) Obligasi Mitratel Tahun 2024

Pada tanggal 4 Juli 2024, Mitratel menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I sebesar Rp240 miliar. Bunga obligasi sebesar 6,50% per tahun akan dibayarkan setiap triwulan. Jatuh tempo obligasi pada tanggal 14 Juli 2025.

BTN ditunjuk sebagai wali amanat atas penerbitan obligasi Mitratel 2024. Penerbitan obligasi ini memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

(c) Sukuk Mitratel Tahun 2024

Pada tanggal 4 Juli 2024, Mitratel menerbitkan Sukuk Ijarah berkelanjutan tahap I sebesar Rp10 miliar. Bunga sukuk sebesar 6,50% per tahun akan dibayarkan setiap triwulan. Jatuh tempo sukuk pada tanggal 14 Juli 2025.

BTN ditunjuk sebagai wali amanat atas penerbitan sukuk Mitratel 2024. Penerbitan sukuk ini memperoleh peringkat AAAsy dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

ii. MTN

Pada tanggal 26 September 2023, Mitratel menerbitkan MTN sebesar Rp550 miliar yang digunakan untuk mendukung penyediaan dana dalam rangka pendanaan ulang, dengan tingkat suku bunga 6,20% dan telah dilunasi pada tanggal 26 Oktober 2024.

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	2024		2023	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
Bank Mandiri	Rp	-	6.355	-	3.453
BNI	Rp	-	6.030	-	6.182
BSI	Rp	-	2.083	-	509
BRI	Rp	-	1.475	-	955
Sub-jumlah			15.943		11.099
Pihak ketiga					
BCA	Rp	-	9.755	-	10.170
DBS	Rp	-	4.800	-	1.500
Bank of China	Rp	-	1.900	-	1.400
Bank CIMB Niaga	Rp	-	1.710	-	2.110
Bank Permata	US\$	6	99	4	60
HSBC	Rp	-	1.021	-	1.313
Bank Danamon	Rp	-	1.000	-	625
Bank Sindikasi	Rp	-	110	-	273
	Rp	-	-	-	2.500
	US\$	4	60	10	160
PT Bank ANZ Indonesia ("Bank ANZ")	Rp	-	22	-	110
BJB	Rp	-	-	-	500
MUFG	Rp	-	-	-	500
Lain-lain	Rp	-	3	-	13
	MYR	7	27	9	29
Sub-jumlah			20.507		21.263
Jumlah			36.450		32.362
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(109)		(102)
			36.341		32.260
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun			(13.519)		(9.282)
Bagian jangka panjang			22.822		22.978

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Bank Mandiri 2018 - 2024	Perusahaan, GSD, PST, Telkomsel, Mitratel	Rp	13.975	8.339	2020 - 2031	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 0,25% - 1,50%	Tidak ada
BNI 2013 - 2024	Perusahaan, TLT, Sigma, Mitratel, UMT	Rp	14.175	1.607	2018 - 2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 2,25%; 3 bulan JIBOR + 0,25% - 1,70%	Piutang usaha dan aset tetap
2024	Mitratel	Rp	2.000	-	2024 - 2031	Bulanan	7,00%	Tidak ada
BSI 2024	Mitratel	Rp	2.292	208	2024 - 2029	Semesteran	7,82%	Tidak ada
BRI 2019 - 2023	Perusahaan, Mitratel	Rp	3.000	434	2021 - 2030	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 0,75%	Tidak ada
BCA 2020 - 2023	Perusahaan, PST, GSD	Rp	9.186	1.660	2020 - 2031	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,00% - 1,50%	Tidak ada
2020 - 2024	Perusahaan, Mitratel	Rp	9.500	596	2024 - 2030	Kuartalan	6,75% - 7,00%	Tidak ada
DBS 2021	Mitratel	Rp	3.500	700	2022 - 2028	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,20%	Tidak ada
2023 - 2024	Perusahaan, Mitratel	Rp	7.000	-	2024 - 2031	Kuartalan	6,50% - 6,90%	Tidak ada
Bank of China 2019	Telkomsel	Rp	1.900	1.400	2021 - 2025	Bulanan	4,90%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga 2019 - 2022	PINS, Mitratel	Rp	2.300	391	2022 - 2029	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,30% - 1,95%	Tidak ada
2021 - 2022	Telin	US\$	0	-	2024 - 2030	Semesteran	6 bulan SOFR + 1,82%	Tidak ada
Bank Permata 2020 - 2022	Mitratel	Rp	2.000	292	2021 - 2029	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,30%	Tidak ada
HSBC 2021 - 2023	Mitratel	Rp	1.250	125	2023 - 2030	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 0,50% - 1,85%	Tidak ada
Bank Danamon 2022	Mitratel	Rp	636	182	2022 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
2024	SSI	Rp	24	1	2024 - 2029	Bulanan	8,75%	Tidak ada
Bank Sindikasi 2018	Telin	US\$	0	0	2020 - 2025	Semesteran	6 bulan SOFR + 1,55%	Tidak ada
Bank ANZ 2015	GSD, PINS	Rp	440	100	2020 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,40% - 2,00%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal

** Lihat Catatan 5 dan Catatan 11 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijamin.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk TLT, Sigma, dan GSD terkait *current ratio* dan *debt to service coverage ratio* yang masih lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk TLT, Sigma, dan GSD untuk pinjaman sebesar Rp660 miliar, Rp106 miliar, dan Rp231 miliar. *Waiver* dari BNI dan BCA diterima masing-masing pada tanggal 10 Desember 2024, 12 Desember 2024, dan 31 Desember 2024, kecuali utang bank GSD yang tidak mendapatkan *waiver letter* dari Bank Mandiri sebelum tanggal 31 Desember 2024, sehingga seluruh saldo pinjaman jangka panjang GSD ke Bank Mandiri sebesar Rp13 miliar telah diklasifikasikan sebagai jangka pendek. *Waiver* berlaku efektif selama 12 bulan setelah periode pelaporan.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha dan keperluan investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp45.762 miliar dan US\$73 juta.

d. Pinjaman lainnya

Kreditur	Saldo terutang	
	2024	2023
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("Sarana Multi Infrastruktur")	-	362
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	-	0
Jumlah	-	362
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	-	(362)
Bagian jangka panjang	-	-

Pada tahun 2024, Perusahaan dan Telkomsat telah melunasi pinjaman lainnya tersebut.

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	11.022	11.108
Mitratel	8.440	9.106
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	934	604
Jumlah	20.396	20.818
	2024	2023
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) tahun berjalan entitas anak:		
Telkomsel	6.434	7.104
Mitratel	594	566
Lain-lain	66	(22)
Jumlah	7.094	7.648

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel dan Mitratel. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel dan Mitratel masing-masing adalah sebesar 30,10% dan 28,16%.

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dan Mitratel disajikan berdasarkan nilai sebelum penyesuaian dan eliminasi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

	Telkomsel		Mitratel	
	2024	2023	2024	2023
Aset lancar	19.374	20.505	3.447	3.420
Aset tidak lancar	98.029	92.461	54.693	53.590
Liabilitas jangka pendek	(41.199)	(40.009)	(12.286)	(11.071)
Liabilitas jangka panjang	(45.216)	(42.308)	(12.467)	(11.901)
Jumlah ekuitas	30.988	30.649	33.387	34.038
Yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	19.966	19.541	24.947	24.932
Kepentingan nonpengendali	11.022	11.108	8.440	9.106

Ringkasan laporan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain:

	Telkomsel		Mitratel	
	2024	2023	2024	2023
Pendapatan	113.340	102.372	9.308	8.595
Beban operasi	(83.883)	(72.005)	(5.129)	(4.955)
Beban lain-lain - bersih	(2.108)	(2.271)	(1.918)	(1.501)
Laba sebelum pajak penghasilan	27.349	28.096	2.261	2.139
Beban pajak penghasilan - bersih	(5.347)	(6.217)	(157)	(128)
Laba tahun berjalan	22.002	21.879	2.104	2.011
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih	355	78	1	2
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	22.357	21.957	2.105	2.013
Diatribusikan kepada				
kepentingan nonpengendali	6.434	7.104	594	566
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	6.627	9.267	407	484

Ringkasan laporan arus kas:

	Telkomsel		Mitratel	
	2024	2023	2024	2023
Kegiatan operasi	38.939	41.693	6.632	5.162
Kegiatan investasi	(14.932)	(14.302)	(3.490)	(6.504)
Kegiatan pendanaan	(25.631)	(28.601)	(3.436)	(4.118)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(1.624)	(1.210)	(294)	(5.460)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM

Keterangan	2024		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.185.694.580	4,23	209
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	9.336.755	0	0
Bogi Witjaksono	6.952.700	0	0
Afriwandi	6.995.200	0	0
Heri Supriadi	7.242.700	0	0
F.M. Venusiana R.	10.629.200	0	0
Herlan Wijanarko	6.995.200	0	0
Muhamad Fajrin Rasyid	6.952.700	0	0
Budi Setyawan Wijaya	7.407.700	0	0
Honesti Basyir	3.250.844	0	0
Komisaris (Catatan 1b):			
Isa Rachmatarwata	3.312.700	0	0
Marcelino Rumambo Pandin	3.312.700	0	0
Ismail	3.312.700	0	0
Arya Mahendra Sinulingga	3.359.500	0	0
Rizal Mallarangeng	3.312.700	0	0
Silmy Karim	1.344.700	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	43.190.450.461	43,68	2.164
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

Keterangan	2023		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	3.973.451.980	4,02	199
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	6.016.355	0	0
Bogi Witjaksono	4.130.400	0	0
Afriwandi	4.172.900	0	0
Heri Supriadi	4.170.400	0	0
F.M. Venusiana R.	7.806.900	0	0
Herlan Wijanarko	4.172.900	0	0
Muhamad Fajrin Rasyid	4.130.400	0	0
Budi Setyawan Wijaya	4.585.400	0	0
Honesti Basyir	370.544	0	0
Komisaris (Catatan 1b):			
Isa Rachmatarwata	1.968.000	0	0
Marcelino Rumambo Pandin	1.968.000	0	0
Ismail	1.968.000	0	0
Arya Mahendra Sinulingga	2.014.800	0	0
Rizal Mallarangeng	1.968.000	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	43.436.968.061	43,89	2.174
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

*The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	2024	2023
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	8.364	8.364
Selisih kurs karena penjabaran	1.102	844
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	9	8
Komponen ekuitas lainnya	37	37
Jumlah	9.898	9.639

23. PENDAPATAN

Grup memperoleh pendapatan dari lini produk utama sebagai berikut:

2024	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon						
Selular	6.077	-	-	183	-	6.260
Telepon tidak bergerak	-	-	397	82	-	479
Jumlah pendapatan telepon	6.077	-	397	265	-	6.739
Pendapatan interkoneksi	363	-	-	8.824	-	9.187
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	72.639	-	-	-	-	72.639
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	11	11.327	2.766	-	14.104
SMS	3.791	-	14	-	-	3.805
Lain-lain	134	-	1.746	1.064	846	3.790
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	76.564	11	13.087	3.830	846	94.338
Pendapatan jaringan	3	-	1.462	1.714	-	3.179
Pendapatan IndiHome	-	26.262	-	-	-	26.262
Layanan lainnya						
E-payment	14	-	1.286	-	-	1.300
Call center service	-	-	1.255	-	-	1.255
Manage service dan terminal	-	1	1.039	5	-	1.045
E-health	-	-	767	-	-	767
Lain-lain	379	36	1.291	333	827	2.866
Jumlah layanan lainnya	393	37	5.638	338	827	7.233
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	83.400	26.310	20.584	14.971	1.673	146.938
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	3.029	-	3.029
Jumlah pendapatan	83.400	26.310	20.584	18.000	1.673	149.967
Penyesuaian dan eliminasi	-	2	9	2	(595)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	83.400	26.312	20.593	18.002	1.078	-
2023	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon						
Selular	8.022	-	-	172	-	8.194
Telepon tidak bergerak	-	332	450	117	-	899
Jumlah pendapatan telepon	8.022	332	450	289	-	9.093
Pendapatan interkoneksi	293	-	-	8.774	-	9.067
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	73.187	-	-	-	-	73.187
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	268	85	8.167	2.379	-	10.899
SMS	3.345	-	35	-	-	3.380
Lain-lain	34	-	2.010	1.098	212	3.354
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	76.834	85	10.212	3.477	212	90.820
Pendapatan jaringan	4	-	1.212	1.266	-	2.482
Pendapatan IndiHome	-	25.992	2.793	-	-	28.785
Layanan lainnya						
Call center service	-	-	1.264	-	-	1.264
Manage service dan terminal	-	-	908	12	-	920
E-health	-	-	761	-	-	761
E-payment	-	-	496	-	-	496
Lain-lain	138	27	1.401	318	858	2.742
Jumlah layanan lainnya	138	27	4.830	330	858	6.183
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	85.291	26.436	19.497	14.136	1.070	146.430
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	2.786	-	2.786
Jumlah pendapatan	85.291	26.436	19.497	16.922	1.070	149.216
Penyesuaian dan eliminasi	-	6	11	6	(668)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	85.291	26.442	19.508	16.928	402	-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PENDAPATAN (lanjutan)

Manajemen mengharapkan bahwa sebagian besar transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 akan diakui sebagai pendapatan selama periode-periode pelaporan berikutnya. Kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi pada tanggal 31 Desember 2024, bagian yang diharapkan dapat direalisasi dalam satu tahun adalah sebesar Rp8.279 miliar dan bagian yang lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp3.498 miliar.

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 28 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2025 hingga 2037. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

24. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Gaji dan tunjangan	9.457	9.674
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	4.214	4.159
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 30)	1.691	1.764
Program pensiun dini	1.186	0
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 31)	226	289
Lain-lain	33	41
Jumlah	16.807	15.927

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

25. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Operasi dan pemeliharaan	24.365	23.057
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 35c.i)	7.687	7.412
Sewa sirkit dan <i>Customer Premise Equipment</i> ("CPE")	3.422	3.462
Beban hak penyelenggaraan dan KPU (Catatan 15)	2.933	2.836
Listrik, gas, dan air	1.097	877
Beban pokok penjualan kartu SIM, voucher, dan periferal (Catatan 7)	584	797
Manajemen proyek	427	489
Asuransi	308	269
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	271	308
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	108	211
Jumlah	41.202	39.718

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban umum	2.448	2.446
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha (Catatan 5)	904	513
Jasa profesional	855	996
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	453	461
Perjalanan	421	443
Rapat	390	334
Sumbangan sosial	233	232
Beban penagihan	194	195
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	327	479
Jumlah	6.225	6.099

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

27. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	2024	2023
Perusahaan:		
Pajak penghasilan ("PPH")		
Pasal 22 - Pembelian barang	-	0
Pasal 23 - Penyerahan jasa	260	238
Entitas anak:		
PPH		
PPH Badan	1	-
Pasal 4(2) - Pajak final	17	1
Pasal 23 - Penyerahan jasa	79	4
PPN	2.076	1.669
Jumlah pajak dibayar di muka	2.433	1.912
Bagian jangka pendek	(2.433)	(1.912)
Bagian jangka panjang	-	-

b. Klaim restitusi pajak

	2024	2023
Perusahaan		
PPH Badan	641	271
PPH 21 - PPh pribadi	154	2
PPN	168	164
Entitas anak		
PPH		
PPH Badan	1.553	699
Pasal 23 - Penyerahan jasa	-	10
PPH 21 - PPh pribadi	7	-
PPN	706	476
Jumlah tagihan restitusi pajak	3.229	1.622
Bagian jangka pendek	(411)	(16)
Bagian jangka panjang (Catatan 13)	2.818	1.606

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 4(2) - Pajak final	11	33
Pasal 21 - PPh pribadi	1	102
Pasal 22 - Pembelian barang	1	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	45	24
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	78	122
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	-	0
PPN	109	170
PPN atas Pemungutan Pajak ("WAPU")	114	163
	<u>359</u>	<u>616</u>
Entitas anak:		
PPh		
Pasal 4(2) - Pajak final	644	317
Pasal 21 - PPh pribadi	160	182
Pasal 22 - Pembelian barang	6	9
Pasal 23 - Penyerahan jasa	33	152
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	587	539
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	178	10
Pasal 29 - PPh Badan	203	1.672
PPN	473	399
PPN WAPU	650	629
	<u>2.934</u>	<u>3.909</u>
Jumlah utang pajak	<u>3.293</u>	<u>4.525</u>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kini		
Perusahaan	905	1.271
Entitas anak	6.730	7.525
	<u>7.635</u>	<u>8.796</u>
Tangguhan		
Perusahaan	608	503
Entitas anak	167	(713)
	<u>775</u>	<u>(210)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>8.410</u>	<u>8.586</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	39.153	40.794
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	25.590	24.647
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	64.743	65.441
Dikurangi: laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(38.949)	(38.965)
Laba sebelum pajak penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan atas pajak final - Perusahaan	25.794	26.476
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(801)	(642)
Laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi penghasilan atas pajak final - Perusahaan	24.993	25.834
Perbedaan temporer:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(324)	(284)
Pendapatan instalasi tanggungan	17	2
Sewa	7	8
Provisi imbalan karyawan	(127)	36
Hak atas tanah, aset takberwujud dan lainnya	67	30
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(175)	(1.032)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(2.695)	(2.006)
Beban yang masih harus dibayar	(127)	-
Lain-lain	(7)	91
Jumlah perbedaan temporer bersih	(3.364)	(3.155)
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	282	204
Sumbangan	211	231
Imbalan karyawan	14	33
Beban untuk mendapatkan obyek pajak penghasilan final	242	217
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(18.342)	(17.062)
(Pendapatan) beban lain-lain dari hasil pemeriksaan pajak	69	1
Lain-lain	95	37
Jumlah perbedaan tetap bersih	(17.429)	(16.339)
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	4.200	6.340
Beban pajak penghasilan kini	798	1.204
Beban pajak penghasilan final	107	67
Jumlah beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	905	1.271
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	6.730	7.525
Jumlah beban pajak penghasilan kini	7.635	8.796

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 19% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	39.153	40.794
Dikurangi pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih konsolidasian	(7.598)	(11.015)
	31.555	29.779
Beban pajak penghasilan dihitung pada tarif Perusahaan	5.995	5.658
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	738	623
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	1.229	2.016
Beban pajak penghasilan final	107	64
Penyesuaian pajak tangguhan	(4)	(203)
Pajak tangguhan yang tidak diakui	8	180
Lain-lain	337	248
Beban pajak penghasilan bersih	8.410	8.586

Dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 17 ayat (1) huruf b mengatur bahwa pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan dalam Pasal 17 ayat (2b) mengatur bahwa bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif seharusnya.

Perusahaan telah menerapkan tarif pajak PPh Badan sebesar 19% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Perusahaan telah menyampaikan SPT Tahunan Badan untuk tahun fiskal 2023 pada tanggal 30 April 2024 kepada Otoritas Pajak sebagaimana ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

- e. Pemeriksaan pajak

- (i) Perusahaan

Pada periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2024, Perusahaan menerima sejumlah ketetapan pajak hasil pemeriksaan pajak tahun pajak 2019, 2020 dan 2021, dimana dari seluruh ketetapan pajak tersebut Perusahaan menerima restitusi bersih sebesar Rp7,7 miliar setelah dipotong dengan tagihan dan ketetapan jenis pajak lainnya. Perusahaan tidak setuju dan mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sebesar Rp35,7 miliar. Selain restitusi dari hasil pemeriksaan pajak, Perusahaan juga menerima restitusi senilai Rp37,9 miliar atas keputusan persetujuan pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN tahun pajak 2015 dan 2016.

Pada bulan Juli 2024, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak tahun 2023. Pada bulan September 2024, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan PPN tahun 2022. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, proses pemeriksaan pajak masih berlangsung.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan menerima sejumlah ketetapan dan putusan pajak. Perusahaan menerima ketetapan pajak hasil pemeriksaan PPN untuk masa Mei 2020 dan telah menerima restitusi sebesar Rp0,3 miliar serta telah menyetujui dan membebaskan ketetapan pajak sebesar Rp0,7 miliar pada laporan laba rugi tahun 2023. Perusahaan juga menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor 1365/B/PK/Pjk/2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) atas sengketa PPh Badan tahun 2015, dengan adanya Putusan tersebut maka seluruh jenis pajak tahun 2015 telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak untuk PPh Badan dan PPh Pemotongan/Pemungutan Tahun 2019 dan 2020, PPN Tahun 2020 (selain Masa Mei) dan untuk seluruh jenis pajak Tahun 2021. Sampai dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum keberatan dan/atau banding.

(ii) Telkomsel

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Telkomsel memiliki sejumlah ketetapan pajak yang sedang dalam proses banding. Rincian klaim restitusi pajak, baik yang berkaitan dengan ketetapan pajak maupun yang belum ditetapkan oleh Otoritas Pajak, termasuk eksposur ketetapan pajak yang tidak disertai dengan klaim pajak oleh Perusahaan, adalah sebagai berikut:

	2024			2023		
	Banding	Lainnya	Jumlah	Banding	Lainnya	Jumlah
Klaim restitusi pajak yang belum ditetapkan oleh Otoritas Pajak						
PPh Badan						
Tahun pajak 2024	-	791	791	-	-	-
Ketetapan pajak dengan klaim restitusi pajak						
PPh Badan						
Tahun pajak 2018	35	-	35	35	-	35
Tahun pajak 2015	294	-	294	294	-	294
Tahun pajak 2014	2	-	2	2	-	2
PPh						
Tahun pajak 2015	-	0	0	-	0	0
PPN						
Tahun pajak 2014	-	-	-	-	0	0
	331	791	1.122	331	0	331
Ketetapan pajak tanpa adanya klaim restitusi pajak						
PPh Badan						
Tahun pajak 2014	35	-	35	35	-	35

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Telkomsel menerima sejumlah surat perintah pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2019, 2021, 2022, dan 2023. Pada tanggal 30 September 2024, Telkomsel menerima SKP Kurang Bayar sebesar Rp6 miliar (termasuk denda sebesar Rp2 miliar) untuk PPN Masukan tahun pajak 2019, dimana Telkomsel bertindak sebagai pemungut PPN. Telkomsel menerima seluruh ketetapan pajak dan mengkompensasi kurang bayar pajak sebesar Rp4 miliar pada PPN dibayar di muka sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, dan mencatat beban pajak tambahan untuk denda. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak untuk tahun pajak lainnya masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Telkomsel menerima surat putusan dari Mahkamah Agung di bulan Februari hingga Mei 2023 yang menolak sepenuhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Otoritas Pajak atas putusan Pengadilan Pajak untuk PPN tahun pajak 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp8 miliar dan Rp24 miliar. Sehingga, Telkomsel telah menerima seluruh keputusan final yang berkekuatan hukum tetap (*"in-kracht"*) dan tidak ada tambahan utang pajak untuk PPN 2014 dan 2015. Pada bulan Oktober 2023, Telkomsel juga menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menerima sebagian permohonan atas PPh dan PPN dan menolak seluruh permohonan keberatan Telkomsel untuk PPh Badan tahun pajak 2018. Telkomsel telah menerima seluruh pengembalian pajak sebesar Rp22 miliar dan mengakui beban sebesar Rp0,20 miliar untuk bagian PPh dan PPN yang ditolak pada laporan keuangan laba rugi 2023.

Manajemen berkeyakinan bahwa Telkomsel memiliki argumen yang kuat untuk mempertahankan posisinya. Perusahaan menentukan bahwa provisi terkait dengan ketentuan pajak tidak diperlukan.

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan		(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi	
	2024	2023	2024	2023
Perusahaan				
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	770	831	(61)	(54)
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala - bersih	781	822	(34)	(196)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(51)	430	(481)	(285)
Provisi imbalan karyawan	276	299	(23)	7
Pendapatan instalasi tangguhan	25	21	4	1
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	42	29	13	6
Beban yang masih harus dibayar	-	24	(24)	-
Sewa	1	-	1	1
Lain-lain	73	76	(3)	17
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	1.917	2.532	(608)	(503)
Telkomsel				
Provisi imbalan karyawan	1.445	1.385	160	168
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	324	205	119	61
Sewa	481	554	(73)	86
Liabilitas kontrak	370	400	(30)	217
Pengukuran nilai wajar atas instrumen-instrumen keuangan	(8)	-	(8)	7
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.361)	(1.228)	(133)	122
Amortisasi lisensi	(174)	(171)	(3)	(25)
Biaya kontrak	(23)	(46)	23	5
Instrumen-instrumen keuangan lainnya	(242)	(165)	(77)	(45)
Aset pajak tangguhan Telkomsel - bersih	812	934	(22)	596
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	680	704	(15)	(70)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(992)	(841)	(130)	187
Beban (manfaat) pajak tangguhan			(775)	210
Aset pajak tangguhan - bersih	3.409	4.170		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(992)	(841)		

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui adalah masing-masing sebesar Rp84.310 miliar dan Rp79.794 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat terealisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Pada bulan Juni 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2023 tentang Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Perusahaan memastikan aspek administrasi dan legal atas transaksi, serta membangun koordinasi yang intensif antar unit yang terkait untuk mengimplementasikan aturan tersebut.

Pada bulan Desember 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Peraturan Menteri Keuangan No. 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Dengan adanya ketentuan tersebut, terdapat perubahan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang sebelumnya menggunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan menjadi menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Perusahaan memastikan dilakukannya koordinasi intensif antar unit yang terkait untuk mengimplementasikan aturan tersebut.

Pada bulan Desember 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen penentuan harga transfer sejak tahun pajak 2024.

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 465 tentang Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan No. 81 Tahun 2024, Perusahaan memastikan koordinasi dengan unit terkait, Tim IT dan otoritas perpajakan agar proses administrasi perpajakan yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan berjalan lancar.

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.

Berbagai negara telah memberlakukan atau bermaksud memberlakukan undang-undang perpajakan untuk mematuhi aturan model Pilar Dua, termasuk Indonesia. Grup berada dalam lingkup PMK 136/2024, yang tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian 2024 tetapi mungkin akan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup mulai 1 Januari 2025 dan seterusnya.

PMK 136/2024 menerapkan mekanisme perpajakan baru yang mensyaratkan Perusahaan Multinasional ("PMN") untuk membayar pajak tambahan di suatu yurisdiksi ketika tarif pajak efektif, yang ditentukan berdasarkan yurisdiksi menurut aturan Pilar Dua, lebih rendah dari tarif minimum 15%. PMK 136/2024 menetapkan mekanisme untuk menentukan entitas mana (atau entitas-entitas mana) dalam Grup PMN yang harus menerapkan pajak tambahan tersebut dan porsi pajak yang dibebankan kepada setiap entitas terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah menerapkan amendemen PSAK 212, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait aturan Pilar Dua sehingga tidak ada dampak terhadap Laporan Keuangan konsolidasian 2024. Dampak masa depan dari aturan Pilar Dua untuk Grup saat ini belum dapat diestimasi secara wajar.

Aturan model Pilar Dua adalah kompleks dan Grup sedang dalam proses untuk mengestimasi dampak potensialnya terhadap laporan keuangan konsolidasian, jika ada. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, Grup tidak mengharapkan adanya dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi (lanjutan)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 222 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. BUMN diwajibkan menyampaikan realisasi kontribusi kepada negara (berbasis kas). Rincian kontribusi kepada negara pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024
Pajak	
PPH	19.960
PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	16.641
Bea Masuk/Keluar, Bea & Cukai, dan Bea Materai	3
PBB P3 Sektor Lainnya	21
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("PDRD"), termasuk PBB P2 (Perkotaan dan Pedesaan)	112
Total kontribusi pajak	36.737
 Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP")	
Dividen	9.211
PNBP Lainnya	9.849
Total kontribusi PNBP	19.060
 Total kontribusi kepada negara	55.797

28. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp23.649 miliar dan Rp24.560 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama periode berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp238,73 dan Rp247,92 (dalam jumlah penuh) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

29. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 73 tertanggal 30 Mei 2023 para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2022 sebesar Rp16.603 miliar (Rp167,59 per lembar saham). Perusahaan melakukan pembayaran dividen kas pada tanggal 5 Juli 2023.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 04 tertanggal 3 Mei 2024 para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2023 sebesar Rp17.683 miliar (Rp178,50 per lembar saham). Perusahaan melakukan pembayaran dividen kas pada tanggal 29 Mei 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	30a.i.a		
Manfaat pasti	30a.i.a.i	3.543	3.666
Manfaat tambahan	30a.i.a.ii	42	44
Perusahaan - <i>unfunded</i>	30a.i.b	215	258
Telkomsel	30a.ii	4.950	4.726
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		8.750	8.694
Imbalan kesehatan pasca kerja	30b	1.550	1.470
Imbalan pasca kerja lainnya	30c	175	244
Imbalan tunjangan masa kerja	30d	1	1
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	30e	1.064	1.005
Jumlah		11.540	11.414

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	30a.i.a		
Manfaat pasti	30a.i.a.i	518	629
Manfaat tambahan	30a.i.a.ii	3	3
Perusahaan - <i>unfunded</i>	30a.i.b	(27)	54
Telkomsel	30a.ii	663	633
Beban pensiun berkala-bersih	24	1.157	1.319
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala-bersih	24,30b	282	205
Beban imbalan pasca kerja lainnya	24,30c	20	22
Beban imbalan tunjangan masa kerja	24,30d	0	1
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	24,30e	232	217
Jumlah		1.691	1.764

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	Catatan	2024	2023
Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti			
Perusahaan - <i>funded</i>	30a.i.a		
Manfaat pasti	30a.i.a.i	72	(524)
Manfaat tambahan	30a.i.a.ii	1	1
Perusahaan - <i>unfunded</i>	30a.i.b	(53)	246
Telkomsel	30a.ii	420	91
Lainnya		0	0
Beban imbalan kesehatan pasca kerja	30b	202	(1.265)
Beban imbalan pasca kerja lainnya	30c	6	(2)
Beban imbalan khusus lainnya	30d	0	-
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	30e	107	41
Sub-jumlah		755	(1.412)
Pajak tangguhan dengan tarif pajak yang berlaku		(120)	23
Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti - bersih		635	(1.389)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pasti dan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program pensiun dan aset program kesehatan pasca kerja, status pendanaan program pensiun dan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan program pensiun manfaat pasti sebagai berikut:

	<i>Funded</i>				Imbalan kesehatan		Jumlah
	Manfaat pasti				pasca kerja		
	Perusahaan		Telkomsel		Perusahaan		
	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja	Aset program kesehatan pasca kerja	
Saldo awal, 1 Januari 2024	23.718	(20.052)	5.796	(1.070)	14.624	(13.154)	9.862
Beban jasa	279	-	346	-	-	-	625
Biaya transfer pegawai	(2)	1	2	(2)	-	-	(1)
Beban bunga (pendapatan bunga)	1.533	(1.304)	381	(65)	966	(866)	645
Beban administrasi program	(115)	115	-	1	-	182	183
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	34	-	-	-	-	-	34
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	1.729	(1.188)	729	(66)	966	(684)	1.486
(Keuntungan) kerugian aktuarial atas:							
Perubahan asumsi pengalaman	(609)	-	(121)	-	65	-	(665)
Perubahan asumsi demografi	(1)	-	-	-	0	-	(1)
Perubahan asumsi keuangan	(491)	-	(314)	-	(863)	-	(1.668)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	1.029	-	15	-	596	1.640
Jumlah yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	(1.101)	1.029	(435)	15	(798)	596	(694)
Kontribusi pemberi kerja	-	(558)	-	(18)	-	-	(576)
Kontribusi peserta program pensiun	13	(13)	1	(1)	-	-	-
Pembayaran imbalan dari aset program	(1.948)	1.948	(2)	1	(640)	640	(1)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(34)	-	-	-	-	-	(34)
Saldo akhir, 31 Desember 2024	22.377	(18.834)	6.089	(1.139)	14.152	(12.602)	10.043
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	3.543		4.950		1.550		10.043

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pasti dan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program pensiun dan aset program kesehatan pasca kerja, status pendanaan program pensiun dan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan program pensiun manfaat pasti sebagai berikut (lanjutan):

	<i>Funded</i>				Imbalan kesehatan pasca kerja		Jumlah
	Manfaat pasti				Perusahaan		
	Perusahaan	Telkomsel	Perusahaan	Aset	Liabilitas	Aset	
	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	keehatan pasca kerja	program keehatan pasca kerja	
Saldo awal, 1 Januari 2023	23.136	(18.902)	5.128	(853)	12.878	(12.878)	8.509
Beban jasa	326	-	331	-	-	-	657
Biaya transfer pegawai	(2)	2	-	-	-	-	-
Beban bunga (pendapatan bunga)	1.573	(1.295)	369	(67)	913	(898)	595
Beban administrasi program	(126)	126	-	0	-	187	187
Penghasilan bunga dari batas atas aset	-	-	-	-	-	3	3
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	50	-	-	-	-	-	50
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	1.821	(1.167)	700	(67)	913	(708)	1.492
(Keuntungan) kerugian aktuarial atas:							
Perubahan asumsi pengalaman	91	-	(76)	-	(907)	-	(892)
Perubahan asumsi keuangan	906	-	(40)	-	2.349	-	3.215
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(473)	-	25	-	(89)	(537)
Perubahan pada batas atas aset	-	-	-	-	-	(88)	(88)
Jumlah yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	997	(473)	(116)	25	1.442	(177)	1.698
Kontribusi pemberi kerja	-	(1.635)	-	(4)	-	-	(1.639)
Kontribusi peserta program pensiun	17	(17)	-	-	-	-	-
Pembayaran imbalan dari aset program	(1.972)	1.972	(149)	-	(586)	586	(149)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(50)	-	-	-	-	-	(50)
Kewajiban dari karyawan yang dialihkan	-	-	233	(171)	-	-	62
Efek atas pengalihan bisnis IndiHome ke Telkomsel	(231)	170	-	-	(23)	23	(61)
Saldo akhir, 31 Desember 2023	23.718	(20.052)	5.796	(1.070)	14.624	(13.154)	9.862
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	3.666	4.726	1.470	9.862			

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat *unfunded*, liabilitas manfaat tambahan, imbalan pasca kerja lainnya, dan kewajiban pensiun berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, perubahan aset program imbalan pensiun tambahan, dan nilai bersih yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan program pensiun manfaat pasti sebagai berikut:

	Perusahaan				Perusahaan dan entitas anak		Jumlah
	<i>Unfunded</i>	Manfaat tambahan	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan khusus masa kerja	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan		
Saldo awal, 1 Januari 2024	258	44	244	1	1.005	1.552	
Beban jasa	9	0	6	0	204	219	
Beban jasa lalu	-	-	1	-	18	19	
Beban bunga	14	3	13	-	10	40	
Biaya transfer pegawai	(0)	(0)	(0)	-	(0)	-	
Biaya penyelesaian Pensiun Dini	(50)	-	0	(0)	(0)	(50)	
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	(27)	3	20	0	232	228	
(Laba) rugi aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	53	(1)	(6)	(0)	(107)	(61)	
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(69)	(4)	(83)	-	(62)	(218)	
Divestasi anak perusahaan	-	-	-	-	(4)	(4)	
Saldo akhir, 31 Desember 2024	215	42	175	1	1.064	1.497	

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat *unfunded*, liabilitas manfaat tambahan, imbalan pasca kerja lainnya, dan kewajiban pensiun berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, perubahan aset program imbalan pensiun tambahan, dan nilai bersih yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan program pensiun manfaat pasti sebagai berikut (lanjutan):

	Perusahaan				Perusahaan dan entitas anak	Jumlah
	<i>Unfunded</i>	Manfaat tambahan	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan khusus masa kerja	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan	
Saldo awal, 1 Januari 2023	522	44	268	1	928	1.763
Beban jasa	22	-	7	1	152	182
Beban bunga	32	3	15	-	65	115
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	54	3	22	1	217	297
(Laba) rugi aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(246)	(1)	2	-	(41)	(286)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(53)	(2)	(38)	(1)	(102)	(196)
Efek atas pengalihan bisnis IndiHome ke Telkomsel	(19)	0	(10)	-	3	(26)
Saldo akhir, 31 Desember 2023	258	44	244	1	1.005	1.552

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

(a) *Funded*

(i) Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur di dalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom (“Dapen”). Pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahannya yang ditetapkan oleh Pendiri dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan peserta.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Dapen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp558 miliar dan Rp1.635 miliar.

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki. Perusahaan memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* (“ALM”) yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perusahaan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(i) Manfaat pasti (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset program manfaat pasti terdiri dari:

	2024		2023	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	921	-	564	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.265	-	1.815	-
Barang konsumen primer	48	-	99	-
Bahan baku	203	-	278	-
Infrastruktur	510	-	748	-
Energi	146	-	162	-
Teknologi	91	-	41	-
Perindustrian	239	-	269	-
Barang konsumen non-primer	448	-	521	-
Properti dan <i>real estate</i>	110	-	113	-
Kesehatan	175	-	211	-
Transportasi dan logistik	4	-	7	-
Reksadana berbasis saham	193	-	379	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	2.034	-	2.469
Obligasi pemerintah	10.608	-	10.350	-
Reksadana pendapatan tetap ("RDPT")	-	66	-	101
MTN	-	100	-	100
Efek beragun aset ("EBA")	-	7	-	13
Sukuk	-	935	-	1.063
Saham non-publik:				
Penempatan langsung	-	377	-	374
Properti	-	202	-	188
Lainnya	-	356	-	366
Jumlah	14.961	4.077	15.557	4.674

Aset program pensiun termasuk di dalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp294 miliar dan Rp457 miliar, yang mewakili 1,54% dan 2,28% dari total aset program pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp338 miliar dan Rp345 miliar mewakili masing-masing 1,78% dan 1,72% dari total aset per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp275 miliar dan Rp1.768 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen. Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan ("RKD") Dapen di atas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 31 Desember 2024, RKD Dapen di bawah 105% sehingga Perusahaan akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(i) Manfaat pasti (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 30 September 2022, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, Perusahaan menetapkan bagi para pensiunan yang berhenti selain karena Hukuman Disiplin, Pensiun Dini, dan Atas Permintaan Sendiri dan menerima Manfaat Pensiun kurang dari Rp1 juta per bulan diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan menjadi Rp1 juta. Pada tahun 2024 dan 2023, Perusahaan memberikan manfaat kesejahteraan tambahan kepada Pensiunan dan penerima manfaat pensiun dari peserta yang memasuki masa pensiun sebelum 30 Juni 2002 masing-masing sebesar Rp34 miliar dan Rp50 miliar.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pada laporan masing-masing tertanggal 19 Maret 2025 dan 1 Maret 2024 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tingkat diskonto	7,00%	6,75%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

(ii) Manfaat Tambahan

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 30 September 2022, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, Perusahaan menyelenggarakan Program Manfaat Lain Iuran Pasti ("PMLIP") dalam bentuk Manfaat Tambahan. Peserta PMLIP berhak menerima Manfaat Pensiun Berkala tiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dana Manfaat Tambahan bersumber dari iuran Manfaat Tambahan Pemberi Kerja dan dana penyisihan hasil pengembangan investasi apabila tercapai RKD di atas 102% dan tingkat pengembalian investasi ("ROI") di atas suku bunga aktuarial untuk pendanaan. Iuran Manfaat Tambahan Pemberi Kerja untuk setiap peserta PMLIP ditetapkan sebesar Rp120 ribu untuk periode iuran 12 bulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah penerimaan.

Penilaian aktuarial untuk program pensiun manfaat tambahan dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pada laporan masing-masing tertanggal 19 Maret 2025 dan 1 Maret 2024 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tingkat diskonto	7,00%	6,75%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(ii) Manfaat Tambahan (lanjutan)

Aset program untuk manfaat tambahan telah disisihkan sejak 2018 sesuai persetujuan Dewan Pengawas. Pada tanggal 31 Desember 2024 tidak ada kewajiban tambahan yang disisihkan karena persyaratan pengakuan manfaat tambahan sebagaimana tersebut di atas belum terpenuhi.

(b) *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya. Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan di mana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52 miliar dan Rp50 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan penyeragaman bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun dihitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan penyeragaman dengan Manfaat Pensiun Sekaligus (“MPS”). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, di mana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun (“MPP”). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, di antaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji reguler, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Mulai tanggal 1 April 2012, karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan tanpa permohonan maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pada laporan masing-masing tertanggal 19 Maret 2025 dan 1 Maret 2024 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tingkat diskonto	7,00%	6,75%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,00% - 8,00%	6,10% - 8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi karyawannya. Berdasarkan program ini, karyawan berhak atas imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan gaji pokok terakhir atau gaji bersih yang diterima (tidak termasuk tunjangan fungsional) dan masa kerjanya. Program pensiun tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, melalui suatu kontrak asuransi anuitas. Hingga tahun 2004, karyawan berkontribusi pada program ini sebesar 5% dari gaji pokok bulanan mereka, sementara Telkomsel menanggung sisa besaran kontribusi yang diharuskan menurut program tersebut. Sejak tahun 2005, Telkomsel telah menanggung sepenuhnya besaran kontribusi tersebut.

Pada tanggal 23 April 2021, Telkomsel dan Jiwasraya sepakat untuk mengakhiri kontrak program asuransi tersebut dan menandatangani perjanjian restrukturisasi. Perjanjian tersebut menggantikan program manfaat dari anuitas menjadi manfaat sekaligus (*lump sum*). Berdasarkan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan nilai tunai pada tanggal pengakhiran yang terbagi menjadi nilai tunai untuk peserta aktif dan peserta pasif masing-masing sebesar Rp857 miliar dan Rp73 miliar. Terdapat potongan 5% dari nilai tunai untuk peserta aktif, maka 95% dari Rp857 miliar (atau setara dengan Rp814 miliar) ditambah Rp73 miliar akan menjadi jumlah yang selanjutnya diambil alih oleh PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") pada saat perjanjian dengan IFG Life menjadi efektif dan karenanya, perjanjian restrukturisasi akan berakhir. Pada tanggal 30 November 2023, dana tunai telah selesai diambil alih oleh IFG Life dengan tidak terdapat perubahan pada program dan nilai tunai yang dialihkan pada tanggal pengalihan, dan di saat yang sama, perjanjian restrukturisasi dinyatakan berakhir.

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan dan Telkomsel menandatangani perjanjian mengenai Dapen untuk menunjuk Telkomsel sebagai Mitra dari Perusahaan sebagai satu-satunya Pendiri, yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi Telkomsel sebagaimana diatur pada Peraturan Dana Pensiun efektif sejak tanggal pemisahan segmen usaha IndiHome ke Telkomsel.

Sejak tanggal pemisahan segmen usaha IndiHome ke Telkomsel, Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang dialihkan, yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur di dalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dapen. Dapen dikelola sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagai Pendiri dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Pendiri.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi sebesar 18% dari gaji pokok ke dana pensiun. Kontribusi Telkomsel kepada Dapen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18 miliar (2023: Rp21 miliar).

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan laporan tertanggal masing-masing 6 Maret 2025 dan 5 Maret 2024 yang dilakukan oleh KKA Halim dan Rekan, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Milliman. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tingkat diskonto	7,10%	6,70%
Tingkat kenaikan kompensasi	7,25% - 8,00%	7,50% - 8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Telkom ("Yakes Telkom").

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes Telkom untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset program terdiri dari:

	2024		2023	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	375	-	392	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.070	-	1.468	-
Barang konsumen primer	78	-	115	-
Bahan baku	197	-	260	-
Infrastruktur	517	-	618	-
Energi	164	-	156	-
Teknologi	43	-	24	-
Perindustrian	242	-	261	-
Barang konsumen non-primer	355	-	395	-
Properti dan <i>real estate</i>	96	-	110	-
Kesehatan	118	-	147	-
Transportasi dan logistik	4	-	5	-
Reksadana berbasis ekuitas	313	-	435	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi pemerintah	1.837	-	1.271	-
Obligasi korporasi	196	-	6	-
Reksadana pendapatan tetap	6.484	-	7.067	-
<i>Exchange Traded Fund</i> ("ETF")	24	-	-	-
Reksadana Indeks	5	-	-	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	507	-	448
Jumlah	12.118	507	12.730	448

Aset program Yakes Telkom juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp217 miliar dan Rp321 miliar yang merupakan 1,72% dan 2,45% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp69 miliar dan Rp6 miliar mewakili masing-masing 0,55% dan 0,04% dari total aset per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp270 miliar dan Rp987 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pada laporan masing-masing tertanggal 19 Maret 2025 dan 1 Maret 2024 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tingkat diskonto	7,00%	6,75%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2024	2023
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir ("BFPT") dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti ("BPP") dan Pesangon Meninggal Dunia ("Pesangon MD"). Pesangon MD diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia dengan besaran sebanyak 12 kali gaji terakhir.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pada laporan masing-masing tertanggal 19 Maret 2025 dan 1 Maret 2024 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSA dan Rekan. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tingkat diskonto	7,00%	6,50%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

d. Imbalan khusus masa kerja

Perusahaan memberikan Tunjangan Khusus Masa Kerja kepada karyawan dengan kriteria karyawan yang diangkat sebelum 1 Juli 2002 dan memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun serta berakhir hubungan kerja setelah 19 September 2019. Jumlah tercatat liabilitas imbalan khusus masa kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1 miliar dan Rp1 miliar. Beban tunjangan masa kerja yang dibebankan adalah sebesar Rp1 miliar dan Rp1 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

e. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 mengenai Ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat liabilitas tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.064 miliar dan Rp1.005 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp232 miliar dan Rp217 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Laba aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebesar Rp107 miliar dan Rp41 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

f. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat						
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan pasca kerja UUCK (Telkom)
	Funded		Unfunded				
Manfaat pasti	Manfaat tambahan						
2024							
Dalam 10 tahun kedepan	20.107	39	277	9.404	8.153	202	118
Dalam 10-20 tahun	15.035	28	110	13.131	13.311	118	488
Dalam 20-30 tahun	8.744	15	212	8.449	13.927	66	610
Dalam 30-40 tahun	3.079	5	20	410	7.896	2	41
Dalam 40-50 tahun	539	1	-	-	2.142	-	-
Dalam 50-60 tahun	37	-	-	-	340	-	-
Dalam 60-70 tahun	1	-	-	-	62	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	7	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	8,16 tahun	8,16 tahun	6,48 tahun	8,49 tahun	13,39 tahun	5,18 tahun	10,71 tahun
2023							
Dalam 10 tahun kedepan	21.044	39	340	8.833	8.929	281	83
Dalam 10-20 tahun	15.850	30	79	13.778	13.651	116	426
Dalam 20-30 tahun	9.623	16	139	9.184	12.128	70	485
Dalam 30-40 tahun	3.630	5	21	439	5.114	3	49
Dalam 40-50 tahun	693	1	-	-	819	-	-
Dalam 50-60 tahun	53	-	-	-	48	-	-
Dalam 60-70 tahun	1	-	-	-	5	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	1	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	8,42 tahun	8,42 tahun	5,54 tahun	9,18 tahun	12,39 tahun	4,51 tahun	11,18 tahun

g. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak atas liabilitas manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Sensitivitas	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
2024				
Didanai:				
Manfaat pasti	(1.809)	2.113	153	(146)
Tidak didanai	(11)	12	13	(12)
Telkomsel	(502)	568	623	(559)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.663)	2.031	1.943	(1.624)
Imbalan pasca kerja lainnya	(9)	10	3	(3)
Imbalan pasca kerja UUCK (Telkom)	(12)	14	37	(32)
2023				
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.030)	2.387	235	(224)
Tidak didanai	(10)	12	13	(12)
Telkomsel	(529)	602	651	(582)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.609)	1.939	1.845	(1.565)
Imbalan pasca kerja lainnya	(11)	12	3	(3)
Imbalan pasca kerja UUCK (Telkom)	(10)	12	33	(28)

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir tahun pelaporan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

g. Analisis sensitivitas (lanjutan)

Hasil sensitivitas tersebut di atas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal eksternal lain yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

31. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan *Long Service Leaves* (“LSL”). LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sebesar Rp1.192 miliar dan Rp1.153 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp226 miliar dan Rp289 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 24).

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
Pemerintah Menteri Keuangan BUMN Indosat	Pemegang saham utama Entitas sependangali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sependangali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bank milik negara BNI	Entitas sependangali Entitas sependangali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban konsultan, beban kesehatan karyawan, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BRI	Entitas sependangali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
Bank Mandiri	Entitas sependangali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")	Entitas sependangali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan beban listrik
Indonesia Financial Group Bahana TCW Sarana Multi Infrastruktur BUMN lainnya	Entitas sependangali Entitas sependangali Entitas sependangali Entitas sependangali	Beban asuransi aset tetap dan beban asuransi kecelakaan diri Reksa dana Pinjaman lainnya dan biaya pendanaan
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk. ("Omni Inovasi Indonesia")	Entitas asosiasi	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya")	Entitas asosiasi	Distribusi kartu SIM dan voucher Prabayar
PT Kereta Cepat Indonesia China ("KCIC")	Entitas berelasi lainnya	Beban pemasaran dan distribusi kartu SIM dan voucher Prabayar
Padi UMMK	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Direksi Komisaris	Personil manajemen kunci Personil pengawas	Beban jasa operasional dan pemeliharaan, beban pencairan piutang, beban pelatihan, beban pengamanan internal, beban pengembangan dan penelitian, beban cetak dan printing, beban rapat, beban umum dan administrasi lainnya, beban promosi, beban iklan, beban <i>fee</i> penjualan, beban <i>customer education</i> , dan beban pemasaran Gaji dan fasilitas Gaji dan fasilitas

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan transaksi signifikan dengan pihak terkait (lanjutan):

	2024		2023	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
Penghasilan pendanaan				
Entitas sependengali				
Bank milik negara	371	27,14	312	29,41
Jumlah	371	27,14	312	29,41

	2024		2023	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
Biaya pendanaan				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	1	0,02	5	0,11
Entitas sependengali				
Bank milik negara	1.329	25,52	1.111	23,88
Sarana Multi Infrastruktur	8	0,15	74	1,59
Jumlah	1.338	25,69	1.190	25,58

	2024		2023	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
Pembelian aset tetap				
Entitas sependengali	29	0,12	64	0,19
Jumlah	29	0,12	64	0,19

	2024		2023	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Distribusi kartu SIM dan voucher				
Entitas asosiasi				
Omni Inovasi Indonesia	371	0,25	467	0,31
Finarya	100	0,07	159	0,11
Jumlah	471	0,32	626	0,42

c. Saldo dengan pihak berelasi

Tabel berikut menyajikan transaksi signifikan dengan pihak terkait:

	2024		2023	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
Kas dan setara kas (Catatan 3)	26.217	8,75	19.024	6,63
Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	918	0,31	800	0,28
Piutang usaha (Catatan 5)	2.350	0,78	1.918	0,67
Aset kontrak				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	16	0,01	36	0,01
Entitas sependengali	193	0,06	252	0,09
Entitas asosiasi	1	0,00	1	0,00
Entitas berelasi lainnya	3	0,00	1	0,00
Jumlah	213	0,07	290	0,10
Aset lancar lainnya	138	0,05	53	0,02
Aset tidak lancar lainnya	12	0,00	5	0,00

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan transaksi signifikan dengan pihak terkait (lanjutan):

	2024		2023	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
Utang usaha (Catatan 15)				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	17	0,01	18	0,01
Entitas sepengendali				
BUMN	317	0,23	302	0,23
Indosat	212	0,15	129	0,10
Lain-lain	-	-	12	0,01
Sub-jumlah	529	0,38	443	0,34
Entitas asosiasi	20	0,01	40	0,03
Entitas berelasi lainnya	60	0,04	84	0,06
Jumlah	626	0,44	585	0,44
Beban yang masih harus dibayar				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	-	-	1	0,00
Entitas sepengendali				
BUMN	209	0,15	137	0,10
Bank milik negara	81	0,06	39	0,03
Sub-jumlah	290	0,21	176	0,13
Entitas asosiasi	1	0,00	-	-
Jumlah	291	0,21	177	0,13
Liabilitas kontrak				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	90	0,07	18	0,01
Entitas sepengendali				
BUMN	474	0,35	312	0,24
Lain-lain	1	0,00	1	0,00
Sub-jumlah	475	0,35	313	0,24
Entitas asosiasi	7	0,01	13	0,01
Entitas berelasi lainnya				
KCIC	1.113	0,81	1.133	0,87
Lain-lain	4	0,00	2	0,00
Sub-jumlah	1.117	0,81	1.135	0,87
Jumlah	1.689	1,24	1.479	1,13
Deposit dari pelanggan	19	0,01	19	0,01
Utang bank jangka pendek (Catatan 18)	5.554	4,05	4.916	3,77
Pinjaman penerusan (Catatan 19a)	-	-	84	0,06
Utang bank jangka panjang (Catatan 19c)	15.943	11,62	11.099	8,51
Pinjaman lainnya (Catatan 19d)	-	-	362	0,28

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 19a).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak (*“Public Switched Telephone Network”* atau *“PSTN”*) milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular (*“Global System for Mobile Communications”* atau *“GSM”*) milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat *Multimedia Mobile* serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa Sambungan Langsung Internasional (*“SLI”*) Perusahaan dengan menekan *“007”*.

Pemilik Indosat, Ooredoo telah melakukan merger dengan Tri, CK Hutchison Holdings (*“CKHH”*) dengan menggabungkan perusahaan mereka menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Dengan adanya merger ini dan Peraturan Menkominfo terbaru No. 5 tahun 2021, Perusahaan telah melakukan amandemen perjanjian kerjasama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (*“SLJJ”*), dan internasional) dan jaringan bergerak pada tanggal 30 Mei 2023 dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Dokumen Penawaran Interkoneksi tahun 2014.

Perusahaan juga menyediakan sewa sirkit kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Aplikasi Lintasarta (*“Lintasarta”*). Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, telex, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

e. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Dewan Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk gaji/honorarium dan fasilitas untuk mendukung tata kelola dan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta tugas kepemimpinan dan manajemen Dewan Direksi. Jumlah remunerasi tersebut adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Dewan Direksi	504	0,47%	475	0,46%
Dewan Komisaris	176	0,16%	179	0,17%

Jumlah yang disajikan pada tabel di atas adalah jumlah yang diakui sebagai beban umum dan administrasi selama periode laporan keuangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Penyesuaian dan eliminasi:

a. Rekonsiliasi pendapatan:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jumlah pendapatan segmen	200.465	199.945
Pendapatan dari segmen non-operasi lainnya	582	645
Penyesuaian dan eliminasi antar segmen	<u>(51.080)</u>	<u>(51.374)</u>
Pendapatan konsolidasi	<u>149.967</u>	<u>149.216</u>

b. Rekonsiliasi hasil segmen:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jumlah hasil segmen	42.687	45.464
Rugi usaha dari segmen non-operasi lainnya	(2.699)	(2.679)
Penyesuaian dan eliminasi antar segmen	3.003	1.599
Penghasilan pendanaan	1.367	1.061
Biaya pendanaan	(5.208)	(4.652)
Bagian laba investasi jangka panjang pada entitas asosiasi	<u>3</u>	<u>1</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasi	<u>39.153</u>	<u>40.794</u>

c. Rekonsiliasi pembelian barang modal:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jumlah pembelian barang modal segmen	(24.317)	(32.852)
Pembelian barang modal dari segmen non-operasi lainnya	<u>(132)</u>	<u>(116)</u>
Pembelian barang modal konsolidasi	<u>(24.449)</u>	<u>(32.968)</u>

d. Rekonsiliasi penyusutan dan amortisasi:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jumlah penyusutan dan amortisasi segmen	(37.060)	(37.113)
Penyusutan dan amortisasi dari segmen non-operasi lainnya	(212)	(250)
Penyesuaian dan eliminasi antar segmen	4.629	4.700
Penyusutan dan amortisasi konsolidasi	<u>(32.643)</u>	<u>(32.663)</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

e. Rekonsiliasi provisi diakui selama tahun berjalan:

	2024	2023
Jumlah provisi diakui segmen	(856)	(537)
Provisi diakui selama tahun berjalan dari segmen non-operasi lainnya	(37)	(5)
Penyesuaian dan eliminasi antar segmen	(11)	29
Provisi yang diakui selama tahun berjalan konsolidasi	(904)	(513)

Informasi geografis:

	2024	2023
Pendapatan eksternal		
Indonesia	141.062	141.157
Luar negeri	8.905	8.059
Jumlah	149.967	149.216

Informasi terkait pendapatan di atas didasarkan pada lokasi pelanggan.

Tidak terdapat pendapatan dari pelanggan utama yang melebihi 10% dari total pendapatan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	187.158	186.554
Luar negeri	2.850	2.932
Jumlah	190.008	189.486

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan pelaporan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

34. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kemudian, peraturan tersebut digantikan dengan UU No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2021 yang membuat menteri yang berwenang dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 5/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang "Penyelenggaraan Telekomunikasi". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- i. Biaya aktivasi;
- ii. Biaya berlangganan bulanan;
- iii. Biaya penggunaan; dan
- iv. Biaya fasilitas tambahan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 31 Maret 2021, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 5/2021 yang memberikan pedoman penetapan tarif selular dengan formula yang terdiri dari biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan ritel.

Berdasarkan peraturan Menkominfo No. 5/2021, tarif selular untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang terhubung melalui jaringan selular bergerak terdiri dari:

- i. Tarif jasa teleponi dasar;
- ii. Tarif jelajah; dan/atau
- iii. Tarif jasa multimedia.

dengan struktur tarif sebagai berikut:

- i. Biaya aktivasi;
- ii. Biaya berlangganan bulanan; dan/atau
- iii. Biaya penggunaan.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/II/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Pada tahun 2008 Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Indonesia menerbitkan peraturan No. 115 tahun 2008 yang mengatur tentang Perjanjian Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Tarif Layanan Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan yang Dimiliki oleh Penyedia Layanan Sewa Jaringan Dominan sesuai dengan usulan Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan peraturan Menkominfo No. 5/2021, Pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur dan perhitungan tarif untuk jasa yang berhubungan dengan sewa jaringan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah ikatan pembelian barang modal adalah sebesar Rp11.272 miliar dan US\$223 juta.

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel dan PT Phincon	12 September 2019 - 11 September 2027	Perjanjian dan Pengadaan <i>Development and Rollout Agreement ("DRA")</i> dan <i>Technical Support Agreement ("TSA")</i> <i>Customer Relationship Management ("CRM") Solution System Integrator</i>
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2021 - 31 Januari 2027	Perjanjian Pengadaan <i>Radio Ultimate Solution ("ROA")</i> dan <i>TSA</i>
Telkomsel, PT Sempurna Global Pratama, PT Lintas Teknologi Indonesia, dan PT Ericsson Indonesia	1 September 2021 - 31 Agustus 2024*	Perjanjian Pengadaan <i>Next Generation of Gateway GPRS Support Node ("GGSN") (Virtualized EPC)</i>
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Oktober 2024 - 7 Oktober 2029	Perjanjian <i>Online Charging System ("OCS")</i> dan <i>Service Control Points ("SCP") System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Oktober 2024 - 7 Oktober 2029	<i>TSA</i> untuk <i>OCS</i> dan <i>SCP</i>
Telkomsat dan Thales Alenia Space France ("TAS")	28 Oktober 2021 - 27 Oktober 2037	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Satelit HTS 113BT
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	13 Februari 2022 - 12 Februari 2025	Perjanjian Pengadaan <i>CS Core Solution ROA</i> dan <i>TSA</i>
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Februari 2022 - 12 Februari 2025	Perjanjian Pengadaan <i>CS Core Solution ROA</i> dan <i>TSA</i>
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	24 Maret 2022 - 24 Maret 2025	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN</i>
Telkomsat dan Space Exploration Technologies Corporation ("SpaceX")	19 April 2022 - 30 Juni 2025	Perjanjian Pengadaan Jasa Peluncuran Satelit HTS 113BT
TDI dan PT Nusacipta Indonesia	1 Juli 2024 - 12 Juni 2025	<i>Pilling and Cut & Fill</i> untuk <i>Project Bromo</i>
TDE dan PT ZTE Indonesia	14 Oktober 2024 - 14 Oktober 2027	Perjanjian Kontrak terhadap <i>General Contractor (GC)</i> untuk <i>Proyek Delta Level-2 Fit Out Works</i>
Perusahaan dan PT Master System Infotama	9 Desember 2024 - 6 Juni 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan IP <i>Backbone Platform Cisco</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	12 Desember 2024 - 25 September 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OTN Metro (OTM) <i>Future State Architecture (FSA)</i> - Platform ZTE
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Desember 2024 - 28 Juni 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OTN Metro (OTM) <i>Future State Architecture (FSA)</i> - Platform Nokia
Perusahaan dan PT Packet Systems Indonesia	18 Desember 2024 - 28 Juli 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OTN Metro (OTM) <i>Future State Architecture (FSA)</i> - Platform Huawei
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	27 Desember 2024 - 28 Juni 2025	Pengadaan dan Pemasangan <i>Multi Service Aggregation (MSA)</i> Platform Nokia
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	31 Desember 2024 - 28 Juni 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan <i>MSA, WAG, BNG, dan PCEF Wifi Platform Huawei</i>

* Telkomsel saat ini sedang melakukan proses perpanjangan perjanjian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Kreditur</u>	<u>Jumlah fasilitas</u>	<u>Akhir periode fasilitas</u>	<u>Mata uang asal</u>	<u>Fasilitas yang digunakan</u>
BRI	500	14 Maret 2026	Rp	10
BNI	500	31 Maret 2025	Rp	49
Bank Mandiri	500	21 Juni 2025	Rp	180
Jumlah	1.500			239

Perusahaan memiliki fasilitas bank yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Catatan 37b.v).

- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2024, Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi untuk berbagai macam proyek sebagai berikut:

<u>Kreditur</u>	<u>Jumlah fasilitas</u>	<u>Akhir periode fasilitas</u>	<u>Mata uang asal</u>	<u>Fasilitas yang digunakan</u>
BRI	1.000	25 September 2028	Rp	618
BNI	2.100	11 Desember 2025	Rp	1.459
	3.100			2.077

Fasilitas bank garansi dengan BRI dan BNI sebagian besar untuk *performance bond* dan *surety bond of radio frequency* (Catatan 35c.i)

- (iii) Telin memiliki fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dan BRI dengan batas kredit maksimum masing-masing sebesar US\$25 juta dan US\$5 juta atau setara dengan Rp403 miliar dan Rp81 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat fasilitas bank garansi yang digunakan.

c. Lainnya

- (i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999, penggunaan spektrum frekuensi radio dan biaya penggunaan frekuensi radio ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 025/TEL.01.02/2022 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, Menkominfo memberikan hak kepada Telkomsel untuk layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan layanan telekomunikasi dasar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016, No. 1896 Tahun 2017, No. 806 Tahun 2019, No. 620 Tahun 2020, No. 178 Tahun 2021 dan No. 479 Tahun 2022, No. 90 Tahun 2023 dan No. 188 Tahun 2023 Telkomsel disyaratkan antara lain, untuk:

- Menyerahkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz.
- Menyerahkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp360 miliar untuk pita frekuensi 2,3 GHz Blok A dan C.
- Menyerahkan *surety bond* sebesar Rp617 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz.
- Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") selama jangka waktu lisensi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPP. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berikut adalah izin penggunaan frekuensi radio pada Telkomsel, atas izin tersebut Telkomsel terutang BHP setiap tahun hingga masa lisensi berakhir:

1. Pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 620 Tahun 2020, terkait dengan perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz, sehingga Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi tahunan pada tahun 2020 sampai 2030.

2. Pita frekuensi radio sampai 2,1 GHz

No. Izin	Deskripsi
Surat Keputusan Menkominfo No. 90 Tahun 2023 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Pada 27 Februari 2023, Telkomsel memperoleh izin penggunaan tahunan atas penggunaan pita frekuensi radio 1.975 - 1.980 MHz berpasangan dengan 2.165 - 2.170 MHz sampai dengan 18 Maret 2033.
Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Menkominfo menyetujui Telkomsel untuk perpanjangan izin atas penggunaan pita frekuensi 1.970 - 1.975 MHz berpasangan dengan 2.160 - 2.165 MHz sampai dengan 28 Maret 2026.
Surat Keputusan Menkominfo No. 806 Tahun 2019 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Menkominfo menyetujui Telkomsel untuk perpanjangan izin atas penggunaan pita frekuensi 1.965 - 1.970 MHz berpasangan dengan 2.155 - 2.160 MHz sampai dengan 30 September 2029.
Surat Keputusan Menkominfo No. 479 Tahun 2022 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Telkomsel sebagai pemenang lelang dan berhak atas penggunaan tahunan atas pita frekuensi radio 1.960 - 1.965 MHz berpasangan dengan 2.150 - 2.155 MHz, terhitung sejak 11 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2033.

3. Pita frekuensi radio sampai 2,3 GHz

No. Izin	Deskripsi
Surat Keputusan Menkominfo No. 1896 tahun 2017	Telkomsel sebagai pemenang atas hak penggunaan pita frekuensi radio 2.300 - 2.330 Mhz sampai dengan 2026.
Surat Keputusan Menkominfo No. 178 Tahun 2021	Telkomsel sebagai pemenang atas penggunaan pita frekuensi radio 2.330 - 2.340 MHz berpasangan dengan 2.340 - 2.350 MHz masing-masing untuk Blok A dan C sampai dengan 2030.
Surat Keputusan Menkominfo No. 487 Tahun 2022 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 92 Tahun 2023	Pada 18 November 2022, Telkomsel memperoleh pengalihan hak penggunaan pita frekuensi radio 2.340 - 2.355 MHz berpasangan dengan 2.330 - 2.360 MHz sampai dengan 17 November 2029.
Surat Keputusan Menkominfo No. 188 Tahun 2023	Pada 18 April 2023, Telkomsel diberikan persetujuan untuk mengalihkan sebagian hak penggunaan spektrum frekuensi radio 2,3 GHz kepada PT Smart Telecom.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Perjanjian kerjasama spektrum frekuensi radio

Menkominfo memberikan persetujuan atas kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Telkomsel dan KCIC melalui Surat Keputusan No. B-171/M.KOMINFO/SP.01.01/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 mengenai Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada rentang 891 - 895 MHz berpasangan dengan 936 - 940 MHz, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Desember 2030.

Sebagai akibat dari perjanjian ini, KCIC akan membayar sejumlah kompensasi kepada Telkomsel yaitu kompensasi biaya penggunaan tahunan sebesar Rp878 miliar per tahun, biaya jaringan pengganti sebesar Rp1.250 miliar, serta biaya operasional dan perawatan tambahan.

(iii) Perjanjian kerjasama sebagai pemasok produk Google

Pada tanggal 10 November 2022, Sigma dan PT Google Cloud Indonesia ("Google") menandatangani perjanjian kerjasama yang memberikan wewenang kepada Sigma sebagai pemasok produk Google. Perjanjian ini mensyaratkan Sigma untuk memenuhi komitmen minimum pembelian produk Google selama tiga tahun dan berkewajiban untuk membayar selisih antara realisasi nilai pembelian produk Google dengan komitmen minimum tersebut.

(iv) Perjanjian Jual Beli Bersyarat Telkomsel dengan PT Dhost Telekomunikasi Nusantara ("Dhost")

Pada tanggal 26 Juni 2024, Telkomsel menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan Dhost untuk penjualan 850 unit *in-building telecommunication coverage antenna system* ("IBS") dengan jumlah imbalan sebesar Rp685 miliar. Kemudian 689 unit dari IBS tersebut digunakan oleh Dhost untuk memenuhi jasa *in-building coverage* kepada Telkomsel. Transaksi ini tidak memenuhi kriteria sewa berdasarkan PSAK 116 dan Telkomsel mencatat keuntungan penjualan sebesar Rp642 miliar.

(v) KPU

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Mitratel pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"), sekarang Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan dengan total harga sebesar Rp261 miliar. Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No. 792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BAKTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp218 miliar, dan sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum dikurangi pajak) dan sisa kompensasi masih belum dibayarkan.

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang menggantikan peraturan sebelumnya terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 827/KOMINFO/BAKTI.31/KS.1/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021, BAKTI memberikan kepada Telkomsel sebagai mitra kerjasama operasi ("KSO") untuk delapan paket KSO, yang meliputi Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Tengah, Papua Tengah Utara, dan Papua Timur Selatan untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2031.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(vi) Kontinjensi

Berdasarkan PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, suatu provisi harus diakui ketika terdapat kewajiban kini (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Pada bulan Oktober 2023, Grup menerima permintaan dokumen dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ("SEC") terkait keterlibatan Telkom Infra dalam proyek dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("BAKTI Kominfo") terkait penyediaan infrastruktur 4G *Base Transceiver Station* ("BTS"). Sejak saat itu, SEC telah memperluas penyelidikannya mencakup isu-isu akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan praktik pelaporan keuangan serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan Grup, termasuk laporan publik mengenai proses hukum tertentu di Indonesia yang melibatkan Grup, beberapa entitas anak dan afiliasinya, serta beberapa klien dan pemasok Grup. Sejak Mei 2024, Grup juga telah menerima permintaan tambahan untuk informasi dari Departemen Kehakiman A.S. ("DOJ") terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Praktik Korupsi Asing A.S. ("FCPA"). SEC dan DOJ saling mengetahui atas masing-masing penyelidikan yang sedang terjadi. Pada tanggal 31 Desember 2024, penyelidikan oleh SEC dan DOJ masih berlangsung. Grup bekerja sama dengan SEC dan DOJ dan telah menunjuk penasihat hukum eksternal untuk melakukan penyelidikan internal terhadap isu-isu yang sedang berlangsung.

Terkait permintaan-permintaan dari SEC mengenai proyek dengan BAKTI Kominfo dan DOJ terkait kepatuhan terhadap FCPA, saat ini Grup belum dapat mengestimasi secara wajar potensi kerugian atau rentang kerugian yang mungkin terjadi, karena permintaan tersebut masih berada pada tahap awal dan terdapat ketidakpastian yang cukup besar terkait waktu atau penyelesaian akhir dari penyelidikan, yang dapat mencakup denda, sanksi, atau dampak terhadap bisnis, jika ada.

Terkait dengan penyelidikan terhadap isu-isu akuntansi dan pengungkapan Grup yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan serta praktik pelaporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, berdasarkan penilaian Grup yang dilakukan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, saat ini Grup tidak berkeyakinan penyelidikan tersebut akan menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 2024.

Namun demikian, terdapat kemungkinan kinerja keuangan di masa mendatang dapat terdampak secara material yang disebabkan perubahan penilaian dari permintaan-permintaan yang telah disebutkan di atas dari SEC atas proyek dengan BAKTI Kominfo, DOJ terkait dengan kepatuhan terhadap FCPA, serta penyelidikan atas isu-isu akuntansi dan pengungkapan Grup.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

i. Klasifikasi

(a) Aset keuangan

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	33.905	29.007
Aset keuangan lancar lainnya	1.196	1.359
Piutang usaha	12.193	10.667
Piutang lain-lain	621	266
Aset tidak lancar lainnya	165	155
FVTPL		
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	8.174	8.028
Aset keuangan lancar lainnya	89	302
FVTOCI		
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	51	25
Jumlah aset keuangan	<u>56.394</u>	<u>49.809</u>

(b) Liabilitas keuangan

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang usaha	15.336	18.608
Utang lain-lain	454	441
Beban yang masih harus dibayar	14.192	13.079
Deposit dari pelanggan	41	42
Utang bank jangka pendek	11.525	9.650
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	-	84
Obligasi dan MTN	5.043	5.343
Utang bank jangka panjang	36.341	32.260
Pinjaman lainnya	-	362
Liabilitas sewa	23.959	20.425
Liabilitas lainnya	104	141
Jumlah liabilitas keuangan	<u>106.995</u>	<u>100.435</u>

ii. Nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan:

	2024	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
				Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
FVTPL						
Aset keuangan lancar lainnya		89	89	89	-	-
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan		8.174	8.174	1.668	-	6.506
FVTOCI						
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan		51	51	-	-	51
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						
Pinjaman:						
Obligasi dan MTN		5.043	5.669	5.669	-	-
Utang bank jangka panjang		36.341	36.472	-	-	36.472
Liabilitas sewa		23.959	23.959	-	-	23.959
Liabilitas lainnya		104	104	-	-	104
Jumlah		<u>73.761</u>	<u>74.518</u>	<u>7.426</u>	<u>-</u>	<u>67.092</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan:

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
2023					
FVTPL					
Aset keuangan lancar lainnya	302	302	302	-	-
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	8.028	8.028	2.056	-	5.972
FVTOCI					
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	25	25	-	-	25
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman:					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	84	83	-	-	83
Obligasi dan MTN	5.343	6.120	5.586	-	534
Utang bank jangka panjang	32.260	31.473	-	-	31.473
Pinjaman lainnya	362	362	-	-	362
Liabilitas sewa	20.425	20.425	-	-	20.425
Liabilitas lainnya	141	141	-	-	141
Jumlah	66.970	66.959	7.944	-	59.015

Keuntungan atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp578 miliar.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah:

	2024	2023
Saldo awal	5.997	6.358
Laba (rugi) yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	578	(687)
Pembelian/penambahan	49	330
Penjualan/pengurangan	(67)	(4)
Saldo akhir	6.557	5.997

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Analisis Sensitivitas

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan informasi kuantitatif atas input signifikan yang tidak dapat diobservasi yang digunakan pada pengukuran nilai wajar level 3:

<u>Industri</u>	<u>Teknik valuasi</u>	<u>Input signifikan yang tidak dapat diobservasi</u>	<u>Rentang (rata-rata tertimbang)</u>	<u>Sensitivitas atas input nilai wajar</u>
Investasi ekuitas Investasi ekuitas tidak terdaftar - teknologi	OPM Backsolve method	Volatility	27% - 80%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada <i>percentage of volatility</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp34 miliar pada nilai investasi
		Exit timing	1 - 6 Tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun <i>exit timing</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp50 miliar pada nilai investasi
	CoCos Equity	Volatility	19,18% - 119,76%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada <i>percentage of volatility</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp36 miliar pada nilai investasi
		Exit timing	1 - 6 Tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun <i>exit timing</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp61 miliar pada nilai investasi
	Probability-weighted Method	Volatility	60% - 80%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada <i>percentage of volatility</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp15 miliar pada nilai investasi
		Exit timing	1,25 - 3,25 Tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun <i>exit timing</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp34 miliar pada nilai investasi
	Recent Transaction	Volatility	53,66% - 73,66%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada <i>percentage of volatility</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp1 miliar pada nilai investasi
		Exit timing	2 - 4 Tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun <i>exit timing</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp0 miliar pada nilai investasi
	Market movement	Volatility	33% - 100%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada <i>percentage of volatility</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp2 miliar pada nilai investasi
		Time to liquidity	1,3 - 4,3 Tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun <i>time to liquidity</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp4 miliar pada nilai investasi

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Analisis Sensitivitas (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan informasi kuantitatif atas input signifikan yang tidak dapat diobservasi yang digunakan pada pengukuran nilai wajar level 3 (lanjutan):

<u>Industri</u>	<u>Teknik valuasi</u>	<u>Input signifikan yang tidak dapat diobservasi</u>	<u>Rentang (rata-rata tertimbang)</u>	<u>Sensitivitas atas input nilai wajar</u>
Investasi ekuitas				
Investasi ekuitas tidak terdaftar - lembaga pemeringkat kredit	<i>Discounted cash flow</i>	<i>Weighted Average Cost of Capital ("WACC")</i>	12% - 24%	Penurunan (kenaikan) sebesar 1% pada WACC akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp13 miliar pada nilai investasi
		<i>Terminal growth rate</i>	1% - 5%	Kenaikan (penurunan) sebesar 1% pada terminal growth rate akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp8 miliar pada nilai investasi
Investasi ekuitas tidak terdaftar - telekomunikasi	<i>Discounted cash flow</i>	WACC	3,2% - 14,7%	Penurunan (kenaikan) sebesar 0,5% pada WACC akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp0 miliar pada nilai investasi
		<i>Terminal growth rate</i>	1,96% - 3,1%	Kenaikan (penurunan) sebesar 1% pada terminal growth rate akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp0 miliar pada nilai investasi
Obligasi konversi				
Investasi ekuitas tidak terdaftar - teknologi	<i>Conversion discount</i>	<i>Probability of qualified financing</i>	50%	Kenaikan (penurunan) sebesar 50% pada <i>probability of qualified financing</i> akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp1 miliar pada nilai investasi

iii. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya)) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

iii. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (a) Nilai wajar pada laporan laba rugi, terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar dari obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan;
- (b) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- (a) Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- (b) Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga pasar, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh Unit *Group Financial Accounting & Treasury* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Dewan Direksi. Unit *Group Financial Accounting & Treasury* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	2024		2023	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	1,02	0,01	0,83	0,01
Liabilitas keuangan	(0,17)	(0,02)	(0,24)	(0,80)
Eksposur bersih	0,85	(0,01)	0,59	(0,79)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 31 Desember 2024 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	<u>Ekuitas/ laba (rugi)</u>
31 Desember 2024	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	137
Yen Jepang (penguatan 5%)	(0)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Desember 2024 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

ii. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 18 dan 19). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pinjaman bunga tetap	48.097	38.386
Pinjaman bunga mengambang	28.771	29.738

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 31 Desember 2024, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp72 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

iv. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kas dan setara kas	33.905	29.007
Aset keuangan lancar lainnya	1.285	1.661
Piutang usaha	12.193	10.667
Piutang lain-lain	621	266
Aset tidak lancar lainnya	165	155
Jumlah	<u>48.169</u>	<u>41.756</u>

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan. Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Group Financial Accounting & Treasury* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup.

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya, karena dimiliki oleh Pemerintah. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit di mana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 5,76% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: 3,53%).

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, di mana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio lancar dan rasio *debt to equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang. Grup memiliki posisi liabilitas jangka pendek bersih pada 31 Desember 2024, dan diperkirakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan memiliki akses pada fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp45.762 miliar dan US\$73 juta (Catatan 19c).

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2025	2026	2027	2028	2029 dan selanjutnya
2024							
Utang usaha	15.336	(15.336)	(15.336)	-	-	-	-
Utang lain-lain	454	(454)	(454)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	14.192	(14.192)	(14.192)	-	-	-	-
Deposito dari pelanggan	41	(41)	(41)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank jangka pendek	11.525	(11.525)	(11.525)	-	-	-	-
Obligasi dan MTN	5.043	(9.307)	(2.763)	(296)	(296)	(297)	(5.655)
Utang bank jangka panjang	36.341	(42.701)	(15.419)	(8.442)	(6.086)	(4.955)	(7.799)
Liabilitas sewa	23.959	(29.261)	(6.824)	(4.597)	(3.656)	(3.152)	(11.032)
Liabilitas lainnya	104	(120)	(6)	(29)	(29)	(28)	(28)
Jumlah	106.995	(122.937)	(66.560)	(13.364)	(10.067)	(8.432)	(24.514)

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2024	2025	2026	2027	2028 dan selanjutnya
2023							
Utang usaha	18.608	(18.608)	(18.608)	-	-	-	-
Utang lain-lain	441	(441)	(441)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	13.079	(13.079)	(13.079)	-	-	-	-
Deposito dari pelanggan	42	(42)	(42)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank jangka pendek	9.650	(9.650)	(9.650)	-	-	-	-
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	84	(85)	(85)	-	-	-	-
Obligasi dan MTN	5.343	(10.163)	(1.086)	(2.574)	(293)	(293)	(5.917)
Utang bank jangka panjang	32.260	(38.386)	(11.194)	(8.090)	(6.901)	(4.569)	(7.632)
Pinjaman lainnya	362	(370)	(370)	-	-	-	-
Liabilitas sewa	20.425	(24.498)	(6.614)	(3.564)	(3.073)	(2.573)	(8.674)
Liabilitas lainnya	141	(146)	(4)	(36)	(36)	(35)	(35)
Jumlah	100.435	(115.468)	(61.173)	(14.264)	(10.303)	(7.470)	(22.258)

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	11.525	5,26%	9.650	4,73%
Utang jangka panjang	65.343	29,85%	58.474	28,68%
Total utang	76.868	35,11%	68.124	33,41%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	142.094	64,89%	135.744	66,59%
Jumlah	218.962	100,00%	203.868	100,00%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau di bawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Jumlah utang dengan bunga	76.868	68.124
Dikurangi: kas dan setara kas	(33.905)	(29.007)
Utang bersih	42.963	39.117
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	142.094	135.744
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	30,24%	28,82%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 19. Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh pemberi pinjaman. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup sudah memenuhi beberapa persyaratan modal yang telah diberlakukan secara eksternal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

- a. Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	2.251	3.905
Kapitalisasi bunga	98	124
Penambahan aset hak-guna melalui:		
Liabilitas sewa (Catatan 12)	10.421	10.390
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	339	479

- b. Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2024	Arus kas	Akuisisi	Perubahan non-tunai			31 Desember 2024
				Perubahan valuta asing	Sewa baru	Perubahan lainnya	
Utang bank jangka pendek	9.650	1.875	-	-	-	-	11.525
Pinjaman penerusan (<i>two step loans</i>)	84	(100)	-	16	-	-	-
Obligasi	5.343	(300)	-	-	-	-	5.043
Utang bank jangka panjang	32.260	3.933	148	7	-	(7)	36.341
Pinjaman lainnya	362	(362)	-	-	-	-	-
Liabilitas sewa	20.425	(7.387)	-	29	10.421	471	23.959
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	68.124	(2.341)	148	52	10.421	464	76.868

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- Pada tanggal 10 Januari 2025, 10 Februari 2025 dan 10 Maret 2025, Telkomsel telah melunasi sebagian utang jangka panjang kepada Bank Mandiri sebesar Rp4.000 miliar.
- Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Nomor 121 tanggal 22 Maret 2025, Pemerintah mengalihkan kepemilikan 51.602.353.559 Saham Seri B, atau 52,09% dari seluruh saham Perusahaan, kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI") melalui proses penyertaan saham *inbreg*. Pengalihan saham ini merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham BKI Untuk Pendirian Holding Operasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("Danantara"). BKI, sebagai penerima pengalihan, merupakan Perusahaan Induk Operasional (*Holding Operasional*) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah melalui Menteri BUMN dan Danantara. Pemerintah tetap berkedudukan sebagai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan (*Ultimate Beneficial Owner*) melalui kepemilikan langsung 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan kepemilikan tidak langsung saham Seri B milik BKI melalui Danantara.
- Pada tanggal 17 April 2025, Perusahaan mengumumkan rencana untuk melakukan pembelian kembali saham yang rencananya akan dilakukan selama periode 28 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2026, dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (“IFRS”)

Di bawah ini disajikan ikhtisar perbedaan signifikan antara PSAK dan IFRS untuk tahun 2024.

Dampak perbedaan antara PSAK dan IFRS atas pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>Referensi</u>	<u>PSAK</u>	<u>Rekonsiliasi</u>	<u>IFRS</u>
ASET				
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian				
Pihak berelasi	b	2.350	655	3.005
Pihak ketiga	b	9.843	(655)	9.188
Aset lancar lainnya		8.174	14	8.188
Jumlah Aset Lancar		63.080	14	63.094
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	a	180.566	(1.981)	178.585
Aset hak-guna	a,d	26.910	1.561	28.471
Aset pajak tangguhan - bersih	d	3.409	28	3.437
Jumlah Aset Tidak Lancar		236.595	(392)	236.203
JUMLAH ASET		299.675	(378)	299.297
 LIABILITAS DAN EKUITAS				
Utang usaha				
Pihak berelasi	b	626	2.634	3.260
Pihak ketiga	b	14.710	(2.634)	12.076
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	d	5.491	(44)	5.447
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		76.767	(44)	76.723
Liabilitas sewa	d	18.468	10	18.478
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		60.418	10	60.428
JUMLAH LIABILITAS		137.185	(34)	137.151
 EKUITAS				
Tambahan modal disetor	c	2.310	(333)	1.977
Komponen ekuitas lainnya	c	9.898	(9.139)	759
Saldo laba	c	124.933	9.266	134.199
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	d	142.094	(206)	141.888
Kepentingan nonpengendali	d	20.396	(138)	20.258
JUMLAH EKUITAS		162.490	(344)	162.146
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		299.675	(378)	299.297

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (“IFRS”) (lanjutan)

Dampak perbedaan antara PSAK dan IFRS atas pos-pos dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>Referensi</u>	<u>PSAK</u>	<u>Rekonsiliasi</u>	<u>IFRS</u>
Beban penyusutan dan amortisasi	a,d	(32.643)	47	(32.596)
Penghasilan lain-lain - bersih	d	281	(29)	252
LABA USAHA		42.991	18	43.009
Biaya pendanaan	d	(5.208)	(13)	(5.221)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		39.153	5	39.158
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		(8.410)	(23)	(8.433)
LABA TAHUN BERJALAN		30.743	(18)	30.725
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		31.638	(18)	31.620
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		23.649	(38)	23.611
Kepentingan nonpengendali		7.094	20	7.114
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		24.434	(38)	24.396
Kepentingan nonpengendali		7.204	20	7.224
LABA PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh)				
Laba bersih per saham		238,73	(0,38)	238,35
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		23.872,88	(38,36)	23.834,52

a. Hak atas tanah

Berdasarkan PSAK, hak atas tanah dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah mana yang lebih pendek.

Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dicatat sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset hak-guna. Hak atas tanah diamortisasi selama masa sewa.

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten, atau Perusahaan Publik, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Berdasarkan IFRS, entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga sejenis baik lokal, nasional, maupun internasional.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS* (“IFRS”) (lanjutan)

c. Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Berdasarkan PSAK, selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali masuk ke dalam kelompok tambahan modal disetor di ekuitas. Sementara berdasarkan IFRS, selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali masuk ke dalam kelompok saldo laba.

d. Perbedaan waktu penerapan standar akuntansi

Grup menerapkan PSAK 116 Sewa mulai tanggal 1 Januari 2020. Penerapan tersebut setara dengan standar akuntansi IFRS 16 *Leases* yang diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2019. Perbedaan waktu penerapan standar akuntansi menyebabkan perbedaan di beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian.